



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RENSTRA PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH 2021-2026

WAHYAWIBAW GRAHA

BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat Daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Sekretariat Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Jember, Maret 2023
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 2 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah	13
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	13
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang.....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah	15
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	26
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	26

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	26
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	27
3.5 Penentuan isu-isu strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan	16
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	25
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	45
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	26
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	26
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA	60
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	30
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 <i>Logical Framework</i> Kabupaten Jember	31
Gambar 4.2 <i>Cascading</i> Error! Bookmark not defined.	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Sekretariat Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Sekretariat Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Sekretariat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan

tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Sekretariat Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan

Dalam menyusun Renstra Perubahan Sekretariat Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Sekretariat Daerah harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Sekretariat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah;

2. Menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Sekretariat Daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember maka Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara ;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , terdiri dari:

1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas
 - a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga daerah, memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan

kegiatan Sekretariat Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Sekretaris daerah juga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan sasaran pelaksanaan operasional program dan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta administrasi dengan memadukan program kerja Pemerintah dan di sesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu, kualitas dan sasaran;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan analisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Perangkat Daerah pada semua bidang dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- d. Pengendalian kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah melalui rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyampaian saran pertimbangan dan/atau telaahan staf kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan;
- f. Pendistribusian tugas kepada para Asisten, Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah maupun para Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

- g. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaannya; dan
- h. Pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat memperoleh kebenaran dan perkembangannya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kerjasama dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama..

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan dan hukum;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang tata pemerintahan, hukum;

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.2.1 Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;

- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.2.3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. Penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;
- f. Pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. Penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Pelaksanaan pembinaan hukum maupun penyuluhan hukum kepada aparatur pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat;
- i. Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada aparatur pemerintah daerah;
- j. Pendampingan masyarakat miskin yang terkena masalah hukum baik secara litigasi dan nonlitigasi;
- k. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi serta sosialisasi produk hukum daerah;
- l. Penyusunan program legislasi daerah;

- m. Pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hukum daerah;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan tugas.

2.1.3.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang:

- a. pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- b. Sumberdaya pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup dan sumber daya alam energi dan air dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumberdaya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumberdaya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- e. Penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian, pembinaan serta promosi produk lokal;
- f. Pelaksanaan pemantauan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang perekonomian;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3.2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

- a. Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD;
- e. Pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
- f. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pengelolaan APBD;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3.3. Bagian Pengadaan Barang Jasa

Bagian Pengadaan Barang Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Pengadaan Barang Jasa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di Bidang Organisasi, Umum dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.4.1 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis

- jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya; dan
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.4.2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun di luar negeri;
- e. Pelaksanaan penyampaian nuchapan duka dan selamat;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.4.3 Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, asisten dan staf ahli;
- d. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris daerah, Asisten dan Staf Ahli;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

d) Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

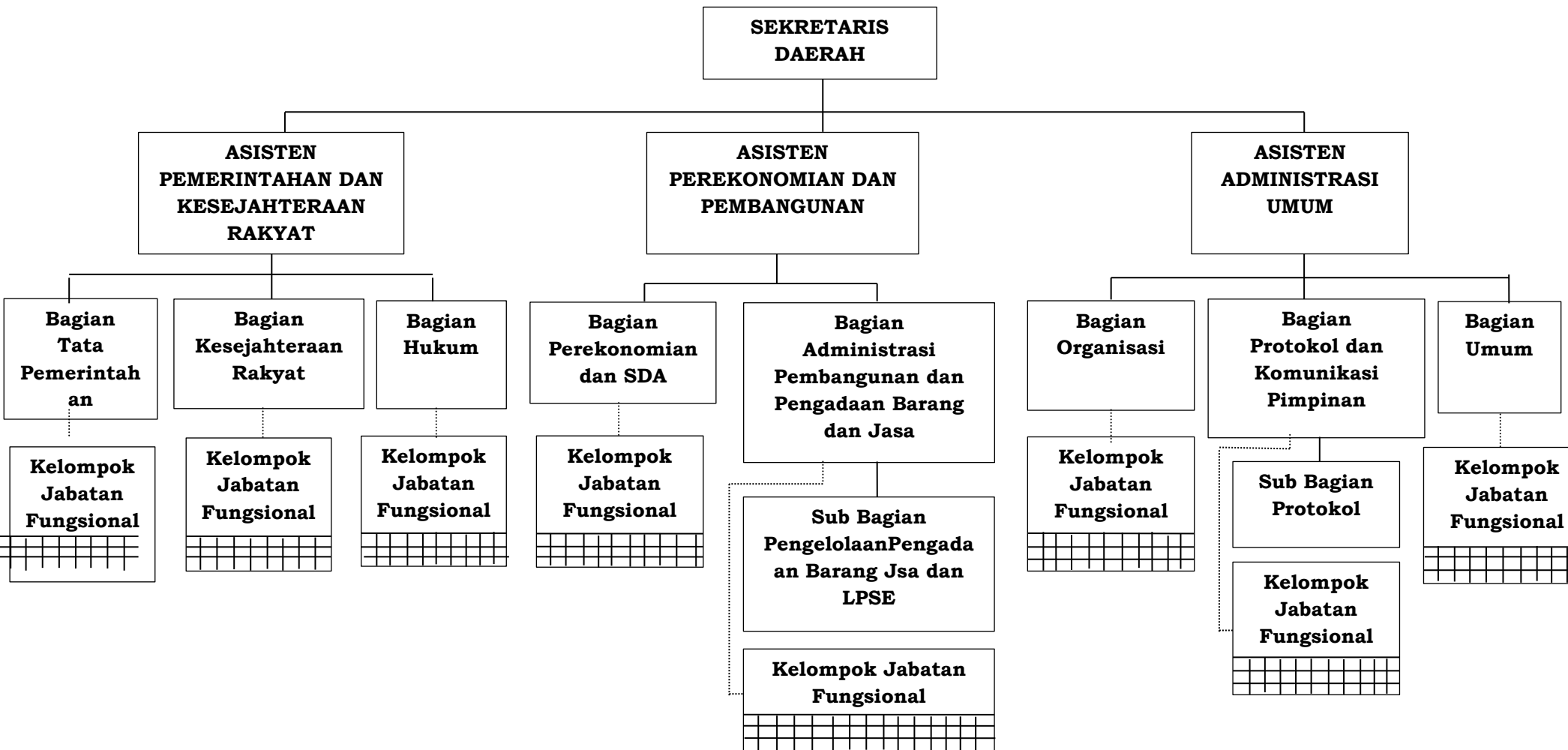
e) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Gambar: 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**



2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Sekretariat Daerah sesuai struktur organisasi dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 6 (enam) orang
2. Eselon III : 4 (empat) orang
3. Eselon IV : 2 (dua) orang
4. Pejabat fungsional : 19 (sembilan belas) orang
5. Staf (Non Eselon ASN) : 100 (seratus)
6. Staf non ASN : 120 (seratus dua puluh).

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan ASN yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 15
2. Sarjana S-1 : 24
3. Diploma -3 : 5
4. Diploma -4 : 3
5. SLTA : 67
6. SLTP : 9
7. SD : 8

Tabel 2.3
Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN
Sekretariat Daerah

NO	ESELON	ASN	NON ASN	TOTAL	KET
1.	Bagian Hukum	8	5	14	Data per 1 Desember 2022
2.	Bagian Tata Pemerintahan	8	9	17	
3.	Bagian Perekonomian	8	1	9	
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2	14	
5.	Bagian Administrasi Pembanguna dan PBJ	8	15	23	
6.	Bagian Organisasi	9	4	13	
7.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	18	30	
8.	Bagian Umum	64	66	130	
	Jumlah	131	120	251	

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Sekretariat Daerah

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin		unit		1.079.192.000
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan		paket		35.000.000
	Jumlah Nilai Aset Tetap					1.114.192.000

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Kesejahteraan Rakyat						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				1.619.351.720
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap					1.619.351.720

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				4,133,442,857
3	KIB C	Gedung dan				-

		Bangunan				
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap					4,133,442,857

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Perekonomian dan SDA						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	1	paket	-	1.029.168.580
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap		1	paket	-	1.029.168.580

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Tata Pemerintahan						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	163	unit	-	984.389.514
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap		163	unit	-	984.389.514

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Hukum						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	151	unit		877.315.150,00

3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
		Jumlah Nilai Aset Tetap				877.315.150,00

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Organisasi						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				1.067.873.000
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
		Jumlah Nilai Aset Tetap				1.067.873.000

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Umum						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				5.442.527.215
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				36.301.890.710
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				
		Jumlah Nilai Aset Tetap				41.744.417.925

Nilai aset tetap yang dimiliki/ dikuasai Sekretariat Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 52.570.150.746 (lima puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember , maka Sekretariat Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Bagian dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		-	-	-	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	55	65	70	75	75	55	65	70	75	75
2	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	-	-	-	50	70	70	75	80	50	55	60	65	70	100	78,6	85,7	86,67	87,5
3	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

6	Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai pedoman	-	-	-	100	100	100	100	100	65	75	85	87	90	65	75	85	87	90
7	Persentase kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Kebijakan penataan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	n.a	n.a	n.a
1	Jumlah event yang diikuti/dilaksanakan	-	-	-	70	90	90	90	90	70	90		90	90	1	1	-	1	1
2	Persentase Calon jamaah Haji tiba di tanah suci dan kembali ke tanah air	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100		100	100	1	1	-	1	1
3	Jumlah kegiatan keagamaan yang terselenggara	-	-	-	50	90	90	90	100	50	90		90	100	1	1	-	1	1
4	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100		100	100	1	1	-	1	1

5	Presentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	-	-	-	66	66	66	100	66	66	66		100	66	1	1	-	1	1
6	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100		100	100	1	1	-	1	1
7	Persentase tingkat partisipasi	-	-	-	0	100	100	100	100	0	100		100	100	####	1	-	1	1
8	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100		100	100	1	1	-	1	1
1	Produk hukum yang dikeluarkan	-	-	-	358	360	473	570	460	365	533	464	507	539	1,02	1,48	0,98	0,889	1,17
2	Sosialisasi Produk Hukum	-	-	-	10	3	5	5	5	10	3	5	5	5	1	1	1	1	1
3	Penyuluhan Hukum	-	-	-	8	23	12	12	12	8	23	12	12	12	1	1	1	1	1
4	Pengurusan Perkara	-	-	-	4	7	8	8	8	4	7	8	8	5	1	1	1	1	0,63
5	Pembinaan Kelompok Kadarkum	-	-	-	3	5	4	6	6	3	5	4	6	6	1	1	1	1	1
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi BUMD PDP Kahyangan Jember (%)				2	2	3	4	5	-1	-0,001	-17	-7,42	-7,58	-50	-0,05	####	#####	####

2	Persentase Peningkatan Nilai Produksi BUMD PDAM Jember (%)				8	8	8	9	9	0,008	0,007	0,001	2,19	1	0,1	0,09	0,01	24,33	11,11
	Jumlah Ketersediaan Buku SSH, ASB, Pedum	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di 69 OPD	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Operasional Aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	96	96	96	100	100	96	96	96
1	Prosentase terlaksananya urusan administrasi tata usaha pimpinan	-	-	-	100	100	100	100	100	79,3	89	90,99	54,86	71,54	79,3	89	90,99	54,86	71,54
2	Prosentase terlaksananya urusan keuangan Bupati/Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf ahli	-	-	-	100	100	100	100	100	83,77	89,55	84,94	67,52	60,49	83,77	89,55	84,94	67,52	60,49
3	Prosentase urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	-	-	-	100	100	100	100	100	71,43	76,2	96,07	94,59	77,66	71,43	76,2	96,07	94,59	77,66

4	Prosentase terlaksananya urusan perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati,Asisten dan Staf Ahli	-	-	-	100	100	100	100	100	51,53	68,09	69,44	72,03	50,51	51,53	68,09	69,44	72,03	50,51
5	Prosentase penerimaan daerah dari sewa Balai Serba Guna dan Wisma Daerah Prajamukti	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
6	Prosentase terlaksananya laporan pertanggungjawaban	-	-	-	100	100	100	100	100	71,12	97,62	93,55	89,91	62,69	71,12	97,62	93,55	89,91	62,69
1	Persentase PD yang Menyusun Laporan Kinerja Sesuai Pedoman				40	60	80	90	100	50	78	78	80	80	125	130	98	89	80
2	Persentase PD yang Menyusun Perjanjian Kinerja Sesuai Pedoman				20	30	50	75	100	18	23	55	80	100	90	76	110	106	100
3	Persentase PD yang memiliki Budaya Kerja (KBK) yang berfungsi dengan baik				10	30	40	50	60	4	4	6	6	6	40	13	15	12	10
4	Persentase Hasil Monev Kelembagaan Yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

5	Prosentase PD yang Menyusun Analisis Jabatan Sesuai Pedoman				60	60	100	100	100	60	60	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase PD yang Menyusun Standar Kompetensi Manajerial/Jabatan (SKJ) Sesuai Pedoman				60	60	100	100	100	10	10	10	10	10	16	16	10	10	10
7	Persentase PD yang Menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan (SP)				20	50	70	80	100	20	28	30	50	60	100	56	43	63	60
8	Persentase PD yang Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)				20	50	70	80	100	21	28	30	50	60	105	56	43	63	60
9	Persentase SPM yang diterapkan dan dilaporkan				66	66	100	100	100	66	73	100	100	100	100	110	100	100	100
10	Persentase PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik				3	5	7	9	10	2	4	5	6	6	67	80	71	67	60
1	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100	100	100	100	100	92,8 %	88,70 %	86%	96%	61%	1	1	1	1	1

2	Presentase Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	89.4 %	75,60 %	87%	95,40 %	94%	1	0,7	0,8	0,9	0,9
3	Presentase Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	84.7 %	95%	99%	98,90 %	86%	0,8	0,9	1	1	0,9
4	Presentase Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	100	100	100	100	100	100 %	76,20 %	90%	0	0	1	0,9	0,9	0	0
5	Presentase Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	100	100	100	100	100	100 %	91,60 %	0	100%	0%	1	0,9	0	1	0
6	Presentase Prog. Kerjasama Informasi dengan Media Massa	-	-	-	100	100	100	100	100	98.7 %	60%	73%	80%	0%	1	0,6	0,7	0,8	0
7	Presentase Pengembangan Dokumentasi Informasi Dan	-	-	-	100	100	100	100	100	0	91&	98%	90%	54%	0	0,9	0,9	0,9	0,5
8	Presentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	0	43%	86%	99%	78%	0	0,4	0,8	1	0,7

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					A n g g a r a n	R e a l i s a s i
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	%	%	%	%	%	%
Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah	125.	150	150	230	40	Rp -	44.949,4	48.522,2	26.832,2	Rp -							
PAD																	
Dana Perimbangan / Transfer	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain lain Pendapatan yang sah	125	150	150	230	40	Rp -	44.949,4	48.522,2	26.832,2	Rp -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
Total Pendapatan	125	150	150	230	40	Rp -	44.949,4	48.522,2	26.832,2		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
Belanja Daerah/Perangkat Daerah	104.423,9	102.209,4	112.468,9	131.956,3	85.253,1	26.959,7	28.447,1	90.624,8	49.252,5	6.196,5							
Belanja Tdk Langsung	42.395,1	36.200	11.758,6	11.133,7	36.534,4			10.803,1	9.890,6	0%	0%	0%	0%	0%	0	0%	0
Belanja Langsung (Bag. Organisasi)	1.464,5	1.649,2	1.649,2	1.500	1.252,6	1.452,6	1.513,1	1.090,3	1.293,3	771	0,992	0,917	0,661	0,86	0,6161		
Belanja Langsung (Bag. Prokopim)	3.347,4	8.656,8	10.692,9	18.685,5	6.110	3.256,8	7.089,6	8.728,6	16.095,1	3.697	0,973	0,819	0,816	0,86	0,6050		

Belanja Langsung (Bag. Tapem)	11.100,5	6.792,9	2.959,6	2.000	2.730	4.850,7	2.105,2	1.808,2	1.580,7	71,41	71,13	90,41	57,90	0,00	-	163,59	
Belanja Langsung (Bag. Kesra)	4.927,2	6.792,9		8.147,8	4.765,2	4.850,7		6.240	1.181,7	69,90	71,41	-	76,58	24,80	-3,29	75,64	
Belanja Langsung (Bag. Ekonomi)	3.653,2	3.653,2	1.750	1.471,3	2.320,3	2.704,3	3.097,7	1.412,2	9.695,2	7.095,4	74,03	84,79	80,70	8,6	4,06		
Belanja Langsung (Bag. Hukum)	785,9	905,3	902,3	835,3	905,9	859,5	824,3	779,2	810,1	0,949475 241	0,914	0,933	0,894	0	1,1E-09	7,7	
Belanja Langsung (Bag. Umum)	21.304,4	21.658,9	48.803,2	54.904,1	25.480,4			37.719,1	720,7		0	0,687	0,028	####	#DIV/0 !		
Belanja Langsung (Bag. AP.PBJ)	15.445,3	15.899,9	33.952,8	33.278,4	5.153,8	8.984,7	13.817	22.043,7	17.679,9	1.727,6	0,58	0,87	0,65	0,53	0,34		

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Sekretariat Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatam

- 1) Kuantitas Sumber Daya Aparatur Yang besar
- 2) Komitmen Pimpinan lembaga untuk mendukung program, dan Visi Misi Pemerintah Daerah
- 3) Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

b. Kelemahan

- 1) Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku
- 2) Belum siapnya aparatur pada jabatan Fungsional sebagai dampak penyetaraan Jabatan Pasca Penyederhanaan Birokrasi

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Perkembangan Teknologi Informasi membuka peluang untuk mengoptimalkan *e-Government* dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Perubahan Sistem Kerja Aparatur Pasca Penyederhanaan Birokrasi

b. Tantangan

- 1) Partisipasi Perangkat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan program Pemerintah Kabupaten
- 2) Mengubah pola pikir / *mindset* aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK)
- 3) Meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan keterbukaan informasi pada di era digital

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Jember, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara ;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan

fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Permasalahan Pelayanan Bagian Hukum			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Harmonisasi dalam penyusunan produk hukum daerah	1. Belum berjalannya system pengendalian penyusunan produk hukum daerah	1. Kurangnya SDM di yang memiliki kompetensi sebagai Analis Peraturan Per UU an; dan Fungsional perancang peraturan per UU-an 2. Ketersediaan SDM di Bagian Hukum tidak sebanding dengan beban kerja fasilitasi penyusunan produk hukum daerah 3. Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyusunan produk hukum daerah; 4. PD kurang

			memahami dinamika perubahan peraturan per UU-an dan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pengaturan berupa PERDA
2	Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH)	Kurang optimalnya publikasi Produk Hukum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SDM di Bagian Hukum tidak sebanding dengan beban kerja fasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Kurang Optimalnya Sarana Prasarana pendukung
Permasalahan Pelayanan Bagian Bagian Administrasi			
Pembangunan dan Pengadaan Barang /Jasa			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Fasilitasi Pelayanan dalam urusan administrasi pembangunan dan pelayanan pengadaan B/J pemerintah	Monev, Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap kegiatan yang terkendala dalam proses pelaksanaannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev kegiatan belum berjalan optimal. 2. Kurangnya koordinasi atau komunikasi dengan pihak ketiga dalam proses pelaksanaan kegiatan. 3. Kurangnya koordinasi dan konsultasi, penyelesaian masalah atau kendala kepada

			TAPD.
	Kebijakan daerah terkait pedoman pelaksanaan APBD	Pedoman penyusunan anggaran belum sepenuhnya selaras dan mengacu peraturan / pedoman berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat terkait pedoman penyusunan anggaran 2. Usulan SSH, HSPK atau ASB yang akan menjadi pedoman perencanaan PD tidak memiliki data dukung yang akurat karena fluktuasi harga dan nilai tukar rupiah.
	Pengukuran impact hasil intervensi kadang tidak bisa diukur dengan indikator secara jelas.	Indikator pengukuran evaluasi kurang jelas	Hasil intervensi sebagian tidak bisa dirasakan secara langsung, karena kurangnya tim evaluator
	Optimalisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PB/J)	Pelaksanaan PB/J terdapat banyak kendala sehingga tidak tepat waktu sesuai perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Personil pengadaan pada UKPBJ • Kurangnya pemahaman aparatur PD terkait pedoman / ketentuan Pelaksanaan PB/J , pemanfaatan LPSE, maupun penggunaan Produk Dalam negeri (PDN) dalam PB/J • Kurangnya pembinaan, monev, koordinasi,

			konsultasi, fasilitasi dan advokasi terhadap kendala pengelolaan PB/J, dan pengelolaan LPSE
	Kemandirian kelembagaan pengadaan barang/jasa (PB/J)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kemandirian kelembagaan PB/J • Belum optimalnya pengelolaan LPSE 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakannya penetapan kebijakan perubahan kelembagaan PB/J • belum terpenuhinya formasi jabatan fungsional pengadaan • Kelembagaan pengadaan barang dan jasa masih bersifat <i>ad hoc</i>, dimana unit PB/J merupakan sub bagian pada Bagian Administrasi Pembangunan dan PB/J • Kurangnya pemanfaatan LPSE oleh PD
Permasalahan Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji	Belum Optimalnya Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Embarkasi haji yang masih berada di ibu kota Provinsi. 2. Titik kumpul jama'ah yang jauh dari tempat tinggal jama'ah karena menyesuaikan dengan lokasi kelompok

			<p>bimbingan ibadah haji (KBIH).</p> <p>3. Kurang optimalnya pengaturan terkait tTingginya antusiasme masyarakat dalam mengantar dan menjemput jama'ah haji.</p> <p>4. Kurangnya kecukupan sarana dan prasarana (transportasi, dll) di titik pemberangkatan</p>
2	Pelaksanaan musabaqoh tilawatil Qur'an	<p>1. penjaringan bakat dan pembinaan untuk melaksanakan kegiatan MTQ secara berjenjang tidak maksimal</p> <p>2. Kurangnya antusiasme peserta lomba MTQ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM dan dukungan anggaran dari tingkat desa dan kecamatan • Kurangnya SDM Juri bersertifikat untuk menjadi juri di setiap desa dan kecamatan. • Kurangnya publikasi lomba MTQ sampai ke pelosok desa
3	Pengelolaan Data tempat dan pengurus tempat ibadah serta data lembaga pendidikan keagamaan dan tenaga pengajar	Kurangnya akurasi Data tempat dan pengurus tempat ibadah serta data lembaga pendidikan keagamaan dan tenaga pengajar	<p>1. Belum tersedianya sistem informasi terpadu yang berbasis <i>online</i> yang memudahkan penyusunan <i>database</i> tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan se</p>

			Kabupaten Jember 3. Kurangnya koordinasi dalam rangka pembangunan system informasi terpadu 4. Kurangnya ketersediaan SDM dalam rangka verifikasi data 5. Belum adanya system pengendalian dan verifikasi data tempat ibadah serta data lembaga pendidikan keagamaan dan tenaga pengajar
4	Pelaksanaan kegiatan religi / peringatan hari hari besar di masyarakat	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam yang monoton bersifat rutin / seremonial dan kurang memberikan dampak terhadap kondusivitas kehidupan antar umat beragama	1. Kurangnya optimalnya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman , keimana dan ketakwaan umat beragama 2. Kurangnya sinergi antar stakeholder dalam membangun kondusivitas kehidupan antar umat beragama
Permasalahan Pelayanan Bagian Organisasi			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Penerapan	Penerapan	1. <i>Mindset/pola</i>

	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi belum optimal dan belum menyeluruh sampai perangkat Daerah	<p>pikir/pemahaman Sebagian besar aparatur terkait reformasi birokrasi yang dipandang hanya merupakan tugas fungsi dan kegiatan PD tertentu.</p> <p>2. Kurangnya sinergitas antara PD penanggung jawab 8 area perubahan reformasi birokrasi</p> <p>3. Masih lemahnya pemahaman PD pengampu 8 area perubahan RB dalam mengawal jalannya reformasi birokrasi sesuai tusinya</p>
2	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja belum berjalan secara optimal.	<p>1. Dokumen Perencanaan (RPJMD dan Renstra) yang merupakan dasar pelaksanaan SAKIP belum memenuhi kaidah akuntabilitas</p> <p>2. Evaluasi kinerja internal yang dilakukan belum memberikan feedback bagi perbaikan SAKIP</p> <p>3. Belum terbangun system Pengukuran dan pengelolaan data kinerja berkala dalam kerangka mengendalikan</p>

			<p>capaian kinerja PD</p> <p>4. Komitmen pimpinan dalam pemanfaatan SAKIP untuk meningkatkan kinerja masih kurang optimal</p> <p>5. <i>Mindset</i> terkait SAKIP dipandang sebagai pemenuhan dokumen belum pada pemanfaatan</p> <p>6. Kurangnya kompetensi SDM perencanaan / pengelola data kinerja</p> <p>7. Kurangnya sinergitas antara Inspektorat, BAPPEDA dan Sekretariat Daerah dalam penerapan kebijakan terkait SAKIP</p>
3.	Pelayanan publik	Pelayanan publik belum optimal	<p>1. Sarana prasarana pada UPP belum terpenuhi sesuai standar UU No. 25 Th 2009</p> <p>2. Belum terintegrasinya pelayanan publik berbasis IT.</p> <p>3. Kurang optimalnya penerapan keterbukaan informasi publik.</p> <p>4. Rendahnya tingkat inovasi pelayanan publik.</p> <p>5. Kurangnya kepatuhan PD terhadap ketentuan</p>

			<p>UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>6. Belum tuntasnya pelaksanaan program <i>Smart City</i> dan <i>E-Government</i></p>
4.	Tatalaksana pemerintahan.	Belum optimalnya tatalaksana pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan daerah terkait instrumen pengendalian dan evaluasi SOP. 2. Belum optimalnya penerpan sistem pemerintahan berbasis elektronik/ SPBE 3. Sebagian besar PD belum melakukan evaluasi berkala terhadap SOP 4. Belum tersusunnya peta proses bisnis pasca penyederhanaan Birokrasi
5.	Penyederhaan birokrasi	Belum optimalnya tindak lanjut penyederhaan birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersusunnya kebijakan system kerja baru pasca PB • <i>Mindset</i> aparatur belum siap mengantisipasi system kerja baru pasca PB • Belum tersedianya kebijakan pusat terkait manajemen kepegawaian daerah terkait pejabat fungsional hasil penyetaraan

			jabatan
7	Penataan kelembagaan/ organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan penataan kelembagaan menyesuaikan terbitnya nomenklatur program • Rendahnya kematangan organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Kepmendagri No. 050 -5889 Th 2021 yang merupakan pemuktahiran dari Permendari No 90 Th 2019 mengatur perubahan nomenklatur program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sehingga masih terdapat nomenklatur PD saat ini yang tidak sesuai dengan Kepmendagri No. 050 -5889 Th 2021 namun juga tidak bertentangan dg PP 18 tahun 2016 2. Pengendalian internal belum dilaksanakan di tingkat PD 3. Belum dilakukannya evaluasi kelembagaan dalam rangka menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten
Permasalahan Pelayanan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan sebagai juru	Kurangnya optimalnya	1. Kurangnya kompetensi SDM di

	bicara pemerintah daerah	pelaksanaan tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah	bidang komunikasi atau juru bicara.atau kehumasan 2. Adanya <i>overlapping</i> tugas Bagian Prokopim sebagai juru bicara pemerintah daerah dengan DISKOMINFO
2.	Pelayanan keprotokolan kegiatan Bupati dan Wabub	Pelayanan keprotokolan kegiatan Bupati dan Wabub belum maksimal.	1. Kurangnya pendidikan dan latihan dibidang keprotokolan. 2. Jumlah SDM untuk protokol masih kurang
3.	Pelayanan pembuatan naskah sambutan	Naskah sambutan monoton, perlu variasi dan lebih tajam dalam mengangkat temaacara	Perlunya meningkatkan jumlah dan kemampuan SDM dalam penyusunan naskah sambutan.
4.	Pelayanan peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Pelayanan peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi petugas peliputan kegiatan Bupati dan Wabup • Kurangnya Jumlah petugas peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati untuk <i>menghandle</i> peningkatan kegiatan bupati/wabup
5.	Pelaksanaan fungsi keprotokolan	Kurangnya tenaga keprotokolan untuk melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada system pemantauan / pencatatan jumlah

	sebagai resepsionis di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember	tugas sebagai resepsionis.	dan kepentingan tamu di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember
Permasalahan Pelayanan Bagian Umum			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya pelayanan Bagian Umum	Kurangnya sarpras pendukung pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dukungan anggaran penyediaan asrama/mess pelajar asal Jember yang belajar di Jogjakarta, dan baru tersedia hanya untuk pelajar putra saja 2. Kurangnya dukungan anggaran revitalisasi bangunan wisda prajamukti dan per luasan lahan
Permasalahan pembangunan Bagian Perekonomian dan SDA			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Realisasi alokasi pupuk bersubsidi	Sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM dalam menginput e-RDCK
2	Pemasaran produk lokal UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya omzet penjualan UMKM - Kurangnya minat masyarakat terhadap produk local UMKM 	Kurangnya promosi dan pemasaran terhadap produk-produk lokal UMKM
3	Rendahnya		Debitur mengalami

	realisasi pengembalian kredit dana bergulir UMKM dikarenakan kurangnya itikad dari debitur UMKM penerima Kredit Dana bergulir untuk mengangsur.		kebangkrutan dan ada yang sudah meninggal dunia sementara kredit dana bergulir adalah kredit tanpa asuransi.
4	Kinerja BUMD dan BLUD	Peningkatan kinerja BUMD dan BLUD belum sesuai target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia strategi / terobosan pencapaian target kinerja untuk mengantisipasi kondisi iklim yang sangat berpengaruh pada produk unggulan dan kondisi perekonomian yang tidak stabil 2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD.
5	Pengendalian Inflasi di Kabupaten Jember	Fluktuasi Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya aktifitas perekonomian karena pandemi covid seperti pembatasan jadwal operasi sektor bisnis dan besarnya tenaga kerja yang di PHK, daya beli menurun. • Belum optimalnya pelaksanaan program

			pengendalian inflasi
6	Pengendalian dan penanganan Cukai Ilegal	Masih maraknya peredaran cukai ilegal di Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya informasi tentang keberadaan cukai ilegal. 2. Maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember. 3. Kurang Efektifnya Operasi bersama untuk memberantas cukai ilegal
Permasalahan Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelimpahan wewenang kepala daerah kepada camat	Skala kewenangan yang perlu di definisi ulang	Perubahan peraturan yang relevan dengan kewenangan
2	Penyusunan LPPD	Belum optimalnya Pengumpulan data untuk penyusunan LPPD	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM, proses perencanaan, tata kelola organisasi • Kurangnya Literasi petugas penyusun LPPD • Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan target pembangunan dan SPM yang telah ditetapkan sesuai peraturan
3	Adanya ego sektoral penentuan peta dasar	Release peta kartografik yang berbeda sesuai kebutuhan	Standar <i>baseline</i> peta yang berbeda (peta berdasarkan kepentingan) belum

		kementerian teknis	one purpose map
4	Kondisi geografis dan kontur wilayah	Wilayah yang luas dan kontur yang beragam membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk melaksanakan kegiatan lapangan	Sumberdaya dan waktu, perlu usaha ekstra dalam pelaksanaan giat.
5	Kegiatan yang bersifat residual dan antisipatif	Perencanaan kegiatan tidak dapat diprediksi kebutuhan pada tataran perencanaan normative	Kebutuhan yang relatif berbeda dari perencanaan
6	Pemenuhan SDM dan Sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas	Sarana prasarana perlu pembaruan (<i>absolote</i>) dan Kurangnya jumlah pegawai pelaksana ideal di Bagian Tata Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dukungan anggaran untuk penyediaan sarpras dimana Sarana prasarana (peralatan kerja) yang ada kurang memadai menghambat pelaksanaan kegiatan • Distribusi pegawai yang kurang ideal menyulitkan untuk membagi habis pekerjaan secara proporsional (tataran pelaksana

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP
PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM
MEMBANGUN JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan

tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-

ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-*

of-doing business) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 Tujuan ke 3 dan Sasaran ke **X** dari RPJMD

Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke-2 Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya		

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran	Faktor	
		Pendukung	Penghambat

	Renstra K/L		
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua PD menyusun Anjab sesuai pedoman • Pemanfaatan Anjab dalam manajemen kepegawaian belum optimal • Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan belum menyeluruh pada semua jenis jabatan • Peningkatan kesejahteraan ASN belum berdampak pada peningkatan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya komitmen dan pemahaman PD terhadap Anjab • Belum maksimalnya pemahaman PD terhadap penggunaan anjab, ABK evjab sebagai instrument pembinaan karir & peningkatan kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah adanya ketentuan perundangan pelaksanaan Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan & Evaluasi Jabatan • PD sudah menyusun anjab dan ABK di instansi masing2
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya indeks inovasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam peningkatan indeks inovasi • Daya dukung anggaran memadai • Adanya regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya publikasi kebijakan inovasi daerah • Kurangnya sinergi <i>stakeholder</i> dalam peningkatan indeks inovasi daerah • Kurangnya kebijakan

		<p>yang mendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki forum inkubasi inovasi (Forum Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten) 	<p><i>reward and punishment</i> untuk keberlanjutan inovasi daerah</p>
<p>Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan daerah</p>	<p>Belum optimalnya harmonisasi produk hukum dan pengelolaan JDIH</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam proses penataan peraturan perundang-undangan dan pembangunan produk hukum daerah. • Daya dukung anggaran memadai • Adanya regulasi yang mendukung • Memiliki media 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya alat (<i>tool</i>) yang efektif dan efisien dalam proses pembentukan produk hukum daerah • Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM perancang peraturan per UU-an pada Bagian Hukum dan di Perangkat Daerah • Terjadinya

		<p>informasi IT berupa jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)</p>	<p>kelambanan dalam pembentukan produk hukum daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kinerja pegawai dalam penyelesaian pembentukan produk hukum daerah • Pengawasan internal dalam pembentukan produk hukum daerah masih belum optimal • Masih lambannya pengolahan dan pelaporan data terkait
--	--	--	---

			pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM pada PD
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan			

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Terwujudnya Kelembagaan Yang Sederhana, Responsif, Adaptif, dan Kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilaksanakannya evaluasi kelembagaan dalam rangka pencapaian kinerja daerah • Belum optimalnya pelaksanaan integrasi pelayanan dan tata laksana pemerintahan berbasis elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi PD dalam penyampaian data indikator teknis kelembagaan • Kurangnya partisipasi PD terkait permasalahan tumpang tindih kewenangan dan tupoksi • Masih lemahnya pemahaman tupoksi sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pemerintah pusat dan Provinsi dalam persiapan pelaksanaan penataan dan pemetaan kelembagaan

		hail koordinasi menjadi tidak maksimal	
Terwujudnya ASN yang Profesional, Berintegritas dan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua PD menyusun Anjab sesuai pedoman • Pemanfaatan Anjab dalam manajemen kepegawaian belum optimal • Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan belum menyeluruh pada semua jenis jabatan • Peningkatan kesejahteraan ASN belum berdampak pada peningkatan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya komitmen dan pemahaman PD terhadap Anjab • Belum maksimalnya pemahaman PD terhadap terhadap penggunaan anjab, ABK sebagai instrument pembinaan karir & peningkatan kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah adanya ketentuan perundangan pelaksanaan Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan & Evaluasi Jabatan • PD sudah menyusun anjab dan ABK di instansi masing2
Terwujudnya Instansi Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem evaluasi Implementasi SAKIP masih lemah dalam mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan • Lemahnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada ketentuan yang tegas tentang sanksi bagi yang tidak melaksanakan implementasi SAKIP sesuai pedoman • Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum penghargaan tingkat nasional bagi daerah yang baik implementasi SAKIPnya

	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang maksimalnya fasilitasi implementasi SAKIP oleh Tim SAKIP Kabupaten • Belum terciptanya budaya kerja yang baik dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal 	<p>PD belum maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman PD tentang Implementasi SAKIP sesuai pedoman 	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem evaluasi pelayanan public masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan • Sebagian besar unit pelayanan belum menerapkan SP dan SOP yang jelas dan transparan • Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informatika dalam peningkatan pelayanan publik • Minimnya Inovasi Pelayanan Publik pada PD 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dan komitmen kepala PD pada peningkatan pelayanan public belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen KDH dan Wakil KDH terhadap pelayanan prima • Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik • Adanya forum penghargaan tingkat nasional dan internasional terhadap inovasi pelayanan public
Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mindset</i>/pola pikir/pemahaman Sebagian besar aparatur di Lingk Pemkab Jember terkait RB yang dipandang hanya merupakan tugas fungsi dan kegiatan PD 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dan komitmen kepala PD pada peningkatan RB belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen KDH dan Wakil KDH terhadap RB • Tuntutan masyarakat terhadap Kinerja Birokrasi

	<p>tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sinergitas antara PD penanggung jawab 8 area perubahan RB • Masih lemahnya pemahaman PD pengampu 8 area perubahan RB dalam mengawal jalannya RB sesuai tusinya 		<p>yang lebih baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelaksanaan evaluasi RB oleh KemenPAN RB
--	--	--	--

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

a. Salah satu Tujuan Renstra Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, inovatif terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan”, yang diukur dengan indikator yakni :

- Meningkatnya prosentase rumusan rekomendasi dan kebijakan bidang pemerintahan , otonomi daerah dan kerjasama(%)
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka sasaran strategis Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah dan Desa”

b. Salah satu Tujuan Renstra Biro Organisasi Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel, Proporsional, Efektif dan Efisien Menuju Pelayanan Prima”.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
- Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
- Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima

c. Salah satu Tujuan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar”

Sasaran dari tujuan ini adalah : “Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar”

Tujuan kedua yaitu Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama, dimana salah satu sasaran dari tujuan ini adalah “ Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan social melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan social”

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi (Renstra Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur)

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah dan Desa		<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pada Bagian Tapem setiap tahun; • Adanya struktur organisasi Bagian Tapem yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan dan diatur • tersedianya DM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan alokasi anggaran SDM dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi organisasi • SOP pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan sesuai dengan bidang pelayanan tugas belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan • Sarana prasarana yang <i>absolote</i> (kuno) • Belum intensifnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

		<p>tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya target kinerja/ indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh Bagian Tapem • Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Administrasi Pemerintahan; • Adanya 	<p>pelaksanaan fungsi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan regulasi kebijakan pemerintah pusat yang kurang optimal dalam proses perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama. • Pergantian petugas penyusun LPPD yang relatif cepat di perangkat daerah sehingga membuat terputusnya regenerasi keilmuan antara petugas lamadan
--	--	--	---

		<p>referensi hukum normatif yang dijadikan acuan norma dalam melaksanakan tugas dan fungsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semangat kolektifitas organisasi untuk selalu dapat menghasilkan output pekerjaan yang terstandarisasi 	<p>petugas baru.</p>
<p>Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan agenda program dan kegiatan • Daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesiapan PD dan <i>mindset</i> aparatur dalam mengantisipasi perubahan system kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi

		<p>dukung anggaran memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesesuaian nomenklatur dan tupoksi bidang dengan Terbitnya Kepmendagri 050-5889 th. 2021
<p>Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan agenda program dan kegiatan • Daya dukung anggaran memadai • Sarana prasarana memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang solidnya PD Utama Pengampu kebijakan SAKIP • Kurangnya <i>awareness</i> aparatur dalam penerapan budaya kinerja dan <i>Core Values</i> BerAKHLAK
<p>Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakannya evaluasi peta proses bisnis pasca

<p>elayanan prima</p>		<p>pengembangan SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya dukung anggaran memadai • Adanya kebijakan Keterbukaan Informasi publik 	<p>penyederhanaan birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum menyeluruhnya pemahaman terhadap kebijakan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien • Belum tuntasnya pengintegrasian system informasi pelayanan publik
<p>Menumbuhkan membangun keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan agenda program dan kegiatan • Daya dukung anggaran memadai • Sarana prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM yang belum memadai • Kurangnya sinergi antar stakeholder dalam membangun kondusivitas antar umat beragama

		a memadai	
Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan social melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan social		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan agenda program dan kegiatan • Daya dukung anggaran memadai • Sarana prasarana memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM verifikator yang belum memadai • Validitas data penerima bantuan social • Kurangnya system pengendalian penyaluran bantuan social

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung perbaikan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur

Apabila diperhatikan sasaran umum Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat

Daerah Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumpalsari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sistim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri

atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energi, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai

dengan peruntukannya

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada limatahun mendatang, adalah:

- 1) Secara selektif tidak semua indikator SDG's dalam KLHS yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember dapat di formulasikan

dalam bentuk dokumen perencanaan OPD sesuai dengan bidang tugas, maka sesuai dengan tugas dan fungsi analisa terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

- 2) Bahwa dalam analisis KLHS pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki 4 pilar utama yaitu : a). Pilar ekonomi.b) pilar social.c). pilar lingkungan dan d). pilar hukum dan tata kelola. Secara selektif berdasarkan analisa integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dikerucutkan sesuai tugas dan fungsi kepada pilar hukum dan tata kelola.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035 tentang kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat pelayanan. Sedangkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tidak berimplikasi secara langsung kepada kebijakan atau program yang dilakukan oleh 7 (tujuh) Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Namun Demikian khususnya pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dapat disampaikan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**. Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat
Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS**

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Bagian Perekonomian dan SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian (alokasi pupuk bersubsidi, pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM, pengendalian inflasi, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, peningkatan produk lokal UMKM) • Terjalinnnya Kemitraan yang baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kualifikasi dan kompentensi di bidang Perekonomian untuk mengolah dan menganalisa data sebagai bahan kebijakan pimpinan; • Masih terdapat permasalahan pengumpulan data dikarenakan masih banyak Perangkat Daerah yang kurang responsif terhadap data yang diminta • Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pada Bagian Perekonomian dan SDA setiap tahun; • Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD 	<p>sarpras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan belum dipahami oleh pelaksana layanan. • Kualifikasi teknis yang dibutuhkan, serta beban kerja belum sebanding dengan ketersediaan personil unit pelayanan pada Bagian Perekonomian dan SDA; • Adanya penjabaran yang kurang sesuai terkait tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan SDA
--	--	---	--

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- Harmonisasi produk hukum
- Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan aparatur pemerintah
- Peningkatan publikasi dan dokumentasi produk hukum daerah
- Meningkatnya peran dan kualitas fungsi kehumasan keprotokolan kepala daerah / wakil kepala daerah
- Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan
- pengendalian pembangunan serta peningkatan pelayanan pengelolaan pengadaan barang / jasa pemerintah
- Realisasi Alokasi Pupuk Bersubsidi
- Peningkatan realisasi pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM
- Peningkatan Kinerja BUMD dan BLUD
- Fluktuasi Inflasi di Kabupaten Jember
- Peredaran Cukai Ilegal
- Peningkatan kualitas LPPD
- Optimalisasi kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- Peningkatan kerjasama daerah baik kerjasama dengan daerah lainnya atau dengan pihak ketiga untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di kabupaten Jember
- Peningkatan kematangan organisasi perangkat daerah yang disebabkan Kurang optimalnya strategi pembinaan dan evaluasi kelembagaan dan kematangan organisasi perangkat daerah

- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan Analisis Jabatan
- Peningkatan kualitas pelayanan public dan penerapan tata laksana
- Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah termasuk dalam Perangkat Daerah Pengampu Misi ke-2 yakni Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN: Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan		Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	92%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	h Daerah (LPPD)								
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90%	92%	94%	96%	100%	100%
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	95%	97%	97%	98%	98%	98%
		Meningkatnya prestasi Kabupaten Jember pada	Prosentase ketercapaian prestasi meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		kompetisi berbasis religi							
	BAGIAN HUKUM : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan		Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	90%	93%	95%	96%	97%	97,5 %
		Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD	100 %	673	675	676	678	680
		Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan	Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu	100 %	113	114	115	116	117

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		hukum							
		Persentase jumlah produk hukum yang sudah diupload di JDIH	Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi dan dapat diakses oleh masyarakat	100 %	600	610	615	620	625
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%						
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan sinergitas bagi seluruh elemen perekonomian dan pembangunan daerah	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		h daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
	Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja		Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di	100 UMK M	100 UMK M	100 UMK M	100 UMK M	100 UMK M	100 UMK M

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Tingkat Kabupaten/Kota						
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA : Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan Pengendalian pembangunan serta peningkatan pelayanan pengelolaan		Indikator Tujuan : Meningkatnya tertib administrasi pembangunan Indikator	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	pengadaan barang / jasa pemerintah								
		Sasaran 1.1 Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	% Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sasaran 1.2 Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	% Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	BAGIAN UMUM: Terwujudnya pelayanan prima kepada Bupati,		Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Reformasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli		Birokrasi						
		Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	BAGIAN ORGANISASI: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima		Indeks Pelayanan Publik	2.75 (C)	3.00 (C)	3.25 (B-)	3.50 (B-)	3.75 (B)	4.01 (A-)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Nilai SAKIP Kabupaten Jember	69.00 (B)	70.47 (BB)	73.47 (BB)	77.26 (BB)	80.12 (A)	80.56 (A)
		Terwujudnya pelayanan publik yang prima yang didukung oleh tata laksana organisasi yang efektif dan efisien	% UPP yang menindaklanjuti hasil pemantauan kepatuhan standar pelayanan publik	40%	50%	75%	75%	75%	75%
			% PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik	40%	50%	50%	50%	50%	50%
			% PD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai pedoman	40%	50%	75%	75%	75%	75%
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	% Dokumen SAKIP PD berkualitas Baik	50%	75%	75%	75%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah dan Penerapan Analisis Jabatan	% Hasil Monev Kelembagaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			% kompetensi jabatan sesuai pedoman	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			% dokumen anjab/ ABK sesuai pedoman	75%	75%	100 %	100 %	100 %	100 %
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN : Meningkatnya pelayanan keprotokol an dan komunikasi pimpinan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol	Prosentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		dan komunikasi pimpinan daerah							
			Prosentase kepuasan pimpinan daerah terhadap pelayanan keprotokolan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program pimpinan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
SETELAH PERUBAHAN									
	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			98,29%	98,31%	98,37%	98,46%
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudk	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi			93%	95%	96%	97%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		an Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel							
		Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Persentase kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama			95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi			100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase peningkatan sinergitas di bidang perekonomian dan SDA, bidang administrasi pembangunan, serta PBJ			100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP			73,47 (BB)	77,26 (BB)	80,12 (A)	80,56 (A)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik			3,25 (B-)	3,50 (B-)	3,75 (B)	4,51 (A-)

Gambar 4.1 Logical Framework Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Cascading

TUJUAN	Tersedianya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)											
INDIKATOR TUJUAN	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)											
SASARAN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel		Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama		Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik			
INDIKATOR SASARAN	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi		Persentase kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama		Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi		Persentase peningkatan sinergitas di bidang perekonomian dan SDA, bidang administrasi pembangunan, serta PBJ		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemerintahan dan Kesra		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemerintahan dan Kesra		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemerintahan dan Kesra		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perekonomian dan Pembangunan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD Administrasi Barang Milik Daerah pada PD Administrasi Umum PD Administrasi Umum PD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Organisasi 		<ol style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan PD Administrasi Umum PD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD Administrasi Keuangan PD Administrasi Kepegawaian PD Administrasi Umum PD Administrasi Umum PD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD Administrasi Keuangan PD Administrasi Kepegawaian PD Administrasi Umum PD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pemantauan kebijakan SDA Pelaksanaan administrasi Pembangunan Pengelolaan pengadaan barang jasa 		<ol style="list-style-type: none"> Administrasi Barang Milik Daerah pada PD Administrasi Keuangan PD Administrasi Kepegawaian PD Administrasi Umum PD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi keuangan dan operasional KDH dan Wakil KDH Fasilitasi Kerumah-tanggaan Setda 	

Cascading

TUJUAN

Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

INDIKATOR
TUJUAN

Nilai SAKIP

SASARAN

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima

INDIKATOR
SASARAN

Indeks Pelayanan Publik

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
2. Administrasi Keuangan PD
3. Administrasi Umum PD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penataan Organisasi
8. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: “WES WAYAHE MBENAH JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”			
MISI II: “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Bagian Tata Pemerintahan: Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lppd)		Memfasilitasi Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menyediakan Kebutuhan Kajian Dalam Rangka Pembangunan Jember
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan Yang Mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kerja Sama Daerah Guna Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Pemerintahan Dan Kebutuhan Kerjasama Daerah Yang Disertai Dengan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan (Pelaksanaan Bimtek)
Bagian Kesejahteraan Rakyat: Meningkatkan Peran Tempat Ibadah Dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Pondok-Pondok Pesantren, Masjid, Mushola, Tpq)	Sosialisasi Proses Pengajuan Bantuan Hibah Tempat Ibadah (Pondok-Pondok Pesantren, Masjid, Mushola, Tpq)	Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas, Monitoring, & Evaluasi Di Bidang Sarana Prasarana Pendidikan Agama, Dan Pembinaan Kehidupan Beragama Di Tempat Ibadah (Pondok-Pondok Pesantren, Masjid, Mushola, Tpq) Serta Peningkatan Fasilitas Layanan Administrasi Dalam Penyaluran Bantuan Hibah Kepada Pondok Pesantren

Meningkatnya Kuantitas Dan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Penyuluh Agama	Meningkatnya Kuantitas Tenaga Pendidikan Non Formal	Memberikan Apresiasi Kepada Masyarakat Yang Memiliki Kemampuan Mengajar Kitab Suci Baik Muslim & Non Muslim (Guru Ngaji) Dan Modin Nikah	Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Para Pengajar Al Qur'an Maupun Kitab Suci Agama Lain
Meningkatnya Peran Seni Dan Budaya Lokal Bernuansa Religi	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Muslim	Melaksanakan Dan Mensosialisasikan Kegiatan – Kegiatan Keagamaan Yang Bersifat Peringatan Hari Besar Islam Maupun Kegiatan Keagamaan Dimasyarakat Muslim	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Dan Kegiatan Di Masyarakat Muslim (Kkm) Sebagai Upaya Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan
Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Jember Dengan Lembaga Keagamaan”	Meningkatnya Prestasi Kabupaten Jember Pada Festival Religi Jawa Timur	Mengakomodir Dan Memfasilitas Bakat Minat Generasi Muda Dalam Pengembangan Baca Tulis Al Qur'an (Mtg & Mqk)	Terlaksananya Program Dan Kegiatan Untuk Peningkatan Nilai Budaya Yang Bersifat Perlombaan Bagi Antar Generasi Sehingga Akan Terwujud Masyarakat Muslim Yang Cinta Dan Mengamalkan Ajaran-Ajaran Al Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Masyarakat Qur'ani)
Bagian Hukum : Terciptanya Situasi Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tertib, Nyaman Dan Berkeadilan		Meningkatkan Jumlah Produk Hukum, Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Produk Hukum Yang Terupload	Melakukan Pelatihan Legal Drafting Untuk Meningkatkan Pemahaman Dalam Penyusunan Perundang-Undangan Serta Menggandeng Pihak Jpn Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum
	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan	Mewujudkan Produk Hukum Yang Berkualitas Dan Tepat Sasaran	Peningkatan Usulan Perda Dari Dprd Dilihat Dari Keperluan Masyarakat; Peningkatan

	Pemerintahan		Persentase Jumlah Fasilitasi; Penyusunan Kebijakan Dalam Membuat Produk Hukum; Meningkatkan Pelayanan Dalam Memfasilitasi Produk Hukum.
	Meningkatnya Pendampingan Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum	Mendorong Dan Meningkatkan Desa/Kelurahan Serta Masyarakat Yang Sadar Hukum	Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk Di Masing-Masing Wilayah; Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum; Peningkatan Kepuasan Dalam Bantuan Hukum Litigasi Dan Litigasi Yang Telah Dilayani.
	Persentase Jumlah Produk Hukum Yang Sudah Diupload Di Jdih	Meningkatkan Pengetahuan Serta Pemahaman Masyarakat Akan Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Ter Updatenya Dokumentasi Produk Hukum Daerah; Mempermudah Masyarakat Dalam Mengakses Dokumentasi Produk Hukum Daerah.
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam: Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah Dan Menguasai Hajat		Berkoordinasi Dengan Stakeholder Dan Mensosialisasikan Peraturan-Peraturan Terkait	Monitoring Dan Evaluasi Berkala Atas Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Terkait

Hidup Orang Banyak			
	Meningkatnya Kontribusi Pdrb Kategori Pertanian	Meningkatkan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pertanian	Mengintegrasikan Kegiatan Hulu (On-Farm) Dengan Kegiatan Hilir (Off-Farm) Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian Dan Perikanan Sehingga Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dan Nelayan Yang Ditunjukkan Dengan Nilai Tukar Petani (Ntp) Dan Nilai Tukar Nelayan (Ntn) Yang Lebih Tinggi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergis Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Memfasilitasi Koordinasi Pengendalian Inflasi Dan Ketersediaan Bahan Pokok Di Kabupaten Jember	Malakukan Koodinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Dan Ketersediaan Bahan Pokok Di Kabupaten Jember
	Meningkatkan Sinergitas Bagi Seluruh Elemen Perekonomian Dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Layanan Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Keindahan Lingkungan	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
	Terjaganya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Keindahan Lingkungan	Menjaga Ketersediaan Bahan-Bahan Pokok Dengan Harga Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
	Meningkatnya Kepatuhan	Mendorong Dan	Monitoring, Evaluasi Dan

	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Memfasilitasi Perangkat Daerah Dalam Penerapan Manajemen Resiko Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Untuk Mencegah Kesalahan Dan/Atau Penyalahgunaan Prosedur	Pelaporan
Meningkatkan Investasi Dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal Yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja		Memfasilitasi Koordinasi BUMD Dan UMKM Baik Dengan Eksekutif Maupun Legislatif	Melaksanakan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pada BUMD Dan UMKM
	Meningkatnya Investor Berskala Nasional (Pmdn/Pma)	Merevitalisasi Atau Membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Baru	Mendorong Terciptanya Iklim Investasi Yang Kompetitif Melalui Kemudahan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Dengan Tetap Mengutamakan Keterlibatan Usaha Kecil, Mikro Dan Koperasi; Kemampuan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal; Serta Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Usaha Mikro	Memfasilitasi Lahirnya Wirausaha Baru Dan Bertumbuhkembangnya Usaha Mikro Dan Kecil Berbasis Potensi Lokal, Seperti Pertanian Dan Perikanan, Terutama Di Pesantren-Pesantren Melalui Strategi Wes	Mendorong Terciptanya Iklim Investasi Yang Kompetitif Melalui Kemudahan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Dengan Tetap Mengutamakan Keterlibatan Usaha Kecil, Mikro Dan Koperasi;

		Wayah Pesantren Berdaya	Kemampuan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal; Serta Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
Bagian Administrasi Pembangunan Dan Pengadaan Barang Dan Jasa : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Dalam Rangka Tertib Pengelolaan Dan Pelaksanaan Apbd Dan Pengendalian Pembangunan Serta Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah		Meningkatkan Tertib Pengelolaan Dan Pelaksanaan Apbd, Pengendalian Pembangunan, Serta Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	1. Efektivitas Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Apbd Dan Pengendalian Pengelolaan Apbd 2. Efektivitas Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Pengendalian Dalam Penerapan Kebijakan
	Sasaran 1.1 Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Apbd	1. Meningkatkan Efektivitas Dan Kinerja Melalui Peningkatan Penatalaksanaan, Tata Kelola Administrasi Perencanaan Dan Monitoring Pengendalian Pembangunan.	1. Optimalisasi Dan Implementasi Petunjuk Teknis, Prosedur & Mekanisme Pelaksanaan Apbd. 2. Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Apbd Opd (Laporan Fisik, Non Fisik & Keuangan) Melalui Aplikasi Tepra Lkpp.
	Sasaran 1.2 Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara	2. Melakukan Intens Pelaksanaan Terhadap Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.	1. Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara

	Elektronik		Elektronik. 2. Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendampingan, Konsultasi Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 3. Optimalisasi Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Bagian Umum: Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Dan Staf Ahli		Memfasilitasi Kebutuhan Dan Semua Kegiatan Pimpinan	Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pimpinan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima Kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Dan Staf Ahli	Memfasilitasi Kebutuhan Dan Semua Kegiatan Pimpinan	Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pimpinan
Bagian Organisasi: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel , Efektif Dan Efisien, Dan Pelayanan Publik Yang Prima		Mefasilitasi Perumusan Kebijakan Dan Mendorong Komitmen Pimpinan Dalam Penerapan Reformasi Birokrasi	Perumusan Kebijakan Dan Mendorong Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik, Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kinerja, Pemanfaatan Anjab
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Oleh Tata Laksana Organisasi Yang Efektif Dan Efisien	Mewujudkan Pelayanan Public Yang Prima Sesuai Tuntutan Dan Kebutuhan Masyarakat	1) Meningkatkan Kepatuhan Upp Terhadap Uu No 25 Tahun 2009 2) Meningkatkan Inovasi Pelayanan Upp 3) Penerapan Tata Laksana

			Pelayanan Sesuai Pedoman
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Membangun Budaya Kinerja Aparatur Dan Mewujudkan <i>Performance Based Budgeting</i>	1) Meningkatkan Komitmen Pd Pengampu Kebijakan Untuk Penerapan Sakip Sesuai Pedoman 2) Membangun Budaya Kinerja Aparatur
	Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah Dan Penerapan Analisis Jabatan	Membangun Kelembagaan Pd Yang Efektif, Efisien Dan Standar Kualitas Sdm Aparatur	1) Mewujudkan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah Dan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah 2) Meningkatkan Kualitas Penyusunan Analisis Jabatan Dan Standar Kompetensi Jabatan
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan: Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan			
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Meningkatkan Pelayanan Keprotokolan, Serta Komunikasi, Dan Dokumentasi Pimpinan Yang Lebih Profesional	1. Mengembangkan Sistem Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi, Dan Dokumentasi Pimpinan Yang Profesional Dan Berkualitas
			2. Mengembangkan Dan Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Protokol, Komunikasi, Dokumentasi Pimpinan Yang Profesional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Sekretariat Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Subbag Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SEBELUM PERUBAHAN																			
BAGIAN TAPEM Tersedia Laporan Penyele nggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)				Ketersediaan Laporan Penyele nggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	90%	92%	2,817,246,275.00	98,23% 86.417.220,00	2.6								99,54% 3.814.551.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel			Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90%	90%		92%								98%	3.814.551.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA yang terpenuhi	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terpenuhi	60%	70%	1,245,623,75.00	78%	1,579,035,720.00							98%	1.650.339.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			KOTA																
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan evaluasi kinerja OPD	100%	100%	97,614,500.00	100%	42,637,980							100%	42.637.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	4.126.000	2 dokumen	4.126.000							2 dokumen	4.126.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200							1 dokumen	4.560.200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen							1 dokumen		4.560.200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen							1 dokumen		4.560.200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

				nan Dokume n DPA- SKPD															
		4.01.01. 2.01.05	Koordi nasi dan Penyu sunan Perub sahan DPA- SKPD	Jumlah Dokume n Perubah an DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n Perubah an DPA- SKPD	1 doku men	1 doku men		1 doku men							1 doku men			Bag. Tapem	Kab upat en Jem ber
							4.5 60. 20 0		4.5 60. 200							4.5 60. 200			
		4.01.01. 2.02	Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h	Persenta se terpenu hinya kebutuh an keuanga n PD	100%	100 %	41 3,7 80, 07 5.0 0	100 %	413 ,78 0,0 75. 00						100 %	413 ,78 0,0 75. 00		Bag. Tapem	Kab upat en Jem ber
		4.01.01.	Penye diaan	Jumlah Dokume	12 doku	12 doku	41 3,7	12 doku	413 ,78						12 doku	413 ,78		Bag.	Kab upat

		2.02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	men	men	80,075.500	men	0,075.000						men	0,075.000	Tapem	en Jember
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada PD	100%	100%	7.100.000	100%	7.100.000						100%	7.100.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	3.420.000	2 dokumen	3.420.000						2 dokumen	3.420.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan	Jumlah Laporan Penatausahaan	1 laporan	1 laporan	3.680.	1 laporan	3.680.						1 laporan	3.680.	Bag. Tapem	Kabupaten

			Barang Milik Daerah pada SKPD	Sahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n	an	000	an	000							an	000		Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	100%	100%		100%								100%	492.620.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket		5 paket								5 paket	103.448.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	2 laporan		2 laporan								2 laporan	62.880.000		

		4.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	320000	12 laporan	320000						12 laporan	320000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan PD	100%	100%	1638000	100%	1638000						100%	1638000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa	Persentase Barang daerah yang terpelihara	90%	100%	791700	100%	791700						100%	791700	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			n Pemer intaha n Daera h															
		4.01.01. 2.09.01	Penye diaan Jasa Pemeli haraan , Biaya Pemeli haraan , dan Pajak Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kenda raan Dinas Jabata n	Jumlah Kendara an Perorang an Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayark an Pajaknya	7 unit	7 unit	55. 01 0.0 00	7 unit	55. 010 .00 0						7 unit	55. 010 .00 0	Bag. Tapem	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.13	Penata an Organi sasi	Nilai LPPD daerah melalui penyeles aian	90%	95%	19 6,6 47, 50 0.0	100 %	172 .22 0.0 00						100 %	254 .84 0.0 00	Bag. Tapem	Kab upat en Jem ber

				EKPPD, jumlah OPD Menyusun data pendukung LPPD sesuai pedoman			0											
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	90%	95%	196,647,500.00	100%	172.2200.00						100%	254.8400.00	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terpenuhinya fasilitas, komunikasi pimpinan	57,50%	60%	45,217,000.00	0%	0						99%	107.974.000.00	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fungsi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	84,15 %	96%	1,571,622,500.00	98%	1,107,381,500.00							99,33%	2.164.212.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
				Persentase dukungan terhadap fungsi kewilayahan														Bag. Tapem	Kabupaten Jember
				Peningkatan presentase inventarisasi, penegasan rupa bumi, dan batas wilayah														Bag. Tapem	Kabupaten Jember

				Peningkatan Kerjasama daerah													Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan	93,30%	95%	72.26000	95%	738.94000						98,70%	1.365.652.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.02.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	156.300.000	2 dokumen	161.53000						98,50%	523.780.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.02.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilaya	3 dokumen	3 dokumen	289.400.000	2 dokumen	294.68000						99,21%	726.450.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

				han														
		4.01.02.02.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 dokumen	3 dokumen	276.920.000	2 dokumen	282.730.000						98,46%	981.320.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	97%	155.680.000	100%	158.450.000						100%	798.560.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	50 dokumen	50 dokumen	63.270.000	50 dokumen	64.180.000						50 dokumen	64.180.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas	1 dokumen	1 dokumen	80.950.000	1 dokumen	82.490.000						1 dokumen	82.490.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jem

			Luar Negeri	Kerja Sama Luar Negeri			00		0							0		ber
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT :	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama			Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	100%	95%	29.025.099.700	97%	27.121.019.570						95%	136.900.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
	Meningkatnya prestasi Kabupaten Jember pada kompetisi			Prosentase ketercapaian prestasi meningkat		100%		100%						100%			Bagian Kesra	Kabupaten Jember

	berbasis religi																	
		4.01.01	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang tercukupi	90%	90%	1.303.977.600	95%	1.399.020.620						90%	10.400.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Prosentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	90%	90%	266.160.000	100%	515.334.000						100%	2.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	90%	100%	266.160.000	12 Laporan	515.334.000						60 Laporan	2.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			ASN	an Tugas ASN															
		4.01.01.20.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasana kantor	80%	80%	953.132.100	90%	734.054.420							85%	3.725.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	80%	80%	206.446.900	2 Paket	27.547.850							10 Paket	500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	80%	80%	250.659.000	12 Paket	234.129.690							60 Paket	1.000.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

		4.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	80%	80%	17.549.200	1 Paket	35.583.280							5 Paket	100.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80%	80%	478.477.000	12 Laporan	436.793.600							60 Laporan	2.125.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01. 20.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar	100%	100%	31.340.000	100%	52.100.000							100%	150.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

				daerah															
		4.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	18.140.00	12 Laporan	38.900.00							60 Laporan	100.000.00	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	13.200.00	12 Laporan	13.200.00							60 Laporan	50.000.00	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01. 20.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar	75%	75%	53.345.00	100%	97.532.200							85%	300.000.00	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			h	daerah														
		4.01.02. 2.02.01	Penye- diaan Jasa Pemeli- haraan , Biaya Pemeli- haraan dan Pajak Kenda- raan Perora- ngan Dinas atau Kenda- raan Dinas Jabata- n	Jumlah Kendara- an Perorang- an Dinas atau Kendara- an Dinas Jabatan yang Dipelihar- a dan dibayark- an pajaknya	75%	75%	20. 25 2.0 00	8 Kend- araa- n	47. 532 .20 0						40 Kend- araa- n	150 .00 0.0 00	Bagian Kesra	Kab- upat- en Jem- ber
		4.01.01. 2.09.06	Pemeli- haraan Peralat- an dan Mesin Lainny- a Mesin Lainny- a	Jumlah Peralat- an dan Mesin Lainnya yang Dipelihar- a	75%	75%	33. 09 3.5 00	15 Peral- atan	50. 000 .00 0						75 Peral- atan	150 .00 0.0 00	Bagian Kesra	Kab- upat- en Jem- ber
		4.01.02	PROG RAM	Prosent- ase hasil	100%	100	25. 75	100	25. 721						100	126	Bagian	Kab- upat

			PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan dasar, permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual, kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama		%	4.805.50	%	.998.950						%	.500.000.000	Kesra	en Jember
		4.01.02.20.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Prosentase meningkatnya kualitas Sarana	100%	100%	24.107.68.30	100%	24.087.492.280						100%	120.000.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			n Rakyat	Prasara a di pondok pesantre n, jumlah guru ngaji dan penyulu h agama dan kegiatan keagama an yang terselen ggara			0									000		
		4.01.02. 2.02.01	Fasilita si Pengel olaan Bina Menta l Spiritu al	Jumlah Dokume n Hasil fasilitasi Pengelol aan Bina Mental Spiritual	100%	100 %	2.1 02. 76 3.3 00	16 Doku men	3.4 52. 428 .74 0						80 Doku men	12. 500 .00 0.0 00	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber
		4.01.02. 2.02.02	Pelaks anaan Kebija kan, Evalua si, dan Capaia	Jumlah Dokume n Hasil Kebijaka n, Evaluasi, dan	100%	100 %	20. 71 1.6 65. 00	4 Doku men	19. 220 .82 0.0 00						20 Doku men	100 .00 0.0 00. 000	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber

			n Kinerja terkait Keseja hteraan Sosial	Capaian Kinerja Terkait Kesejaht eraan Sosial meliputi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Belanja Jasa, Tenaga Administ rasi, Belanja bantuan Sosial Uang yang Direncan akan Kepada Individu (guru ngaji)			0												
		4.01.02. 2.02.03	Pelaks anaan Kebija	Jumlah Dokume n Hasil	100%	100 %	1.2 93.	3 Doku	1.4 14. 243						15 Doku	7.5 00.	Bagian Kesra	Kab upat en	

			kan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat meliputi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat		24 0.0 00	men	.54 0						men	000 .00 0		Jember
--	--	--	---	---	--	-----------------	-----	----------	--	--	--	--	--	-----	-----------------	--	--------

				<p>Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasar kan Peratura n Perunda ng- Undanga n, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterang an Terdafta r dengan Meningk</p>														
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				atnya Jumlah Guru Ngaji dan Penyulu h Agama														
		4.01.02. 20.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah event lomba religi yang diikuti/di laksanakan	100%	100%	1.6 47. 13 7.2 00	100%	1.6 34. 506 .67 0						100%	6.5 00. 000 .00 0	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.02. 2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%	1.6 47. 13 7.2 00	6 Dokumen	1.6 34. 506 .67 0						30 Dokumen	8.0 00. 000 .00 0	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
BAGIAN HUKUM : Terciptanya situasi kondisi masyar				Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman	100%	90%	3.2 72. 96 0.8 00, 00	93%	3.6 00. 780 .55 2,0 0						94%	2.8 69. 312 .41 0,0 0	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

akat yang aman, tertib, n yaman dan berkeadilan				dan berkeadilan														
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan				Prosentase peningkatan produk hukum daerah		100 %		100 %							100		Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Persentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang tercukup	100%	100 %	1.321.850,00	100 %	1.212.330.552,00						100 %	939.357.660,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

			KOTA	i														
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan evaluasi kinerja OPD (RKA, DPA, RKAP, DPPA)	100%	100%	42.680,00	100%	30.324,00						100%	16.196,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 dokumen	7 dokumen	10.672,00	7 dokumen	7.581,00						7 dokumen	3.221,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	7 dokumen	7 dokumen	10.672,00	7 dokumen	7.581,00						7 dokumen	6.449,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

			sunan Doku men Perub ahan RKA- SKPD	dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n Perubah an RKA- SKPD			00, 00		,00							,00		ber	
		4.01.01. 2.01.04	Koordi nasi dan Penyu sunan DPA- SKPD	Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n DPA- SKPD	7 doku men	7 doku men	10. 67 2.0 00, 00	7 doku men	7.5 81. 000 ,00							7 doku men	297 .00 0,0 0	Bagian Hukum	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.01.05	Koordi nasi dan Penyu sunan Perub ahan	Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil	7 doku men	7 doku men	10. 67 2.0 00, 00	7 doku men	7.5 81. 000 ,00							7 doku men	6.2 29. 000 ,00	Bagian Hukum	Kab upat en Jem ber

			DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD														
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan, honor non ASN, ATK dan Lembur OPD	100%	100%	627.299.300,00	100%	782.432.052,00						100%	599.818.415,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 laporan	12 laporan	627.299.300,00	12 laporan	782.432.052,00						12 laporan	599.818.415,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

				ASN														
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	100%	100%	651.872.500,00	100%	399.574.500,00						100%	323.343.245,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor guna menunjang kebutuhan ASN	100%	100%	431.450.000,00	0	-						0	-	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	19.954.500,00	1 paket	13.256.500,00						1 paket	12.397.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.	Penyenggar	Jumlah laporan	100%	100%	20	12 laporan	386						12 laporan	310	Bagian	Kabupaten

		2.06.09	aan Rapat Koordi nasi dan Konsul tasi SKPD	penyele nggaraa n rapat koordina si dan konsulta si SKPD		%	0.4 68. 00 0,0 0	an	.31 8.0 00, 00						an	.94 6.2 45, 00	Hukum	en Jem ber
		4.01.02	PROG RAM PEME RINTA HAN DAN KESEJA HTERA AN RAKYA T	Prosentase produk hukum yang terselesa ikan, kasus dan bankum yang diselesai kan, produk hukum yang terpublik asi	100%	100 %	1.9 51. 10 1.0 00, 00	100 %	2.3 88. 450 .00 0,0 0						70%	1.9 29. 954 .75 0,0 0	Bagian Hukum	Kab upat en Jem ber
		4.01.02. 2.05	Fasilita si dan Koordi nasi Huku m		100%	100 %	1.9 51. 10 1.0 00, 00	100 %	2.3 88. 450 .00 0,0						70%	1.9 29. 954 .75 0,0	Bagian Hukum	Kab upat en Jem ber

							00		0							0			
		4.01.02. 2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD	100%	100 %	51 7.4 50. 00 0,0 0	673 doku men	466 .80 0.0 00, 00							650 doku men	283 .16 8.5 50, 00	Bagian Hukum	Kab upat en Jem ber
BAGIAN BAGIAN PEREKONOMIA N DAN SUMBER DAYA ALAM: Meningkatkan kualitas pertum buhan ekono mi yang merata antar wilayah				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Lapor an	12 Lapo ran		12 Lapo ran	58. 271 .10 0							60 Lapo ran	300 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber

dan mengu sai hajat hidup orang banyak																			
	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	58.271.100							60 Laporan	300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUT	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	12 Laporan	12 Laporan	130.499.500	12 Laporan	58.271.100							60 Laporan	300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			UHAN POKO K DAN BARA NG PENTI NG	dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%														
		3.30.04. 2.03	Kegiat an Penga wasan Pupuk dan Pestisi da Bersub sidi di Tingka t Daera h Kabup aten/K ota	Jumlah Laporan Pengawa san Penyalur an dan Penggung aan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Lapor an	12 Lapo ran	13 0.4 99. 50 0	12 Lapo ran	58. 271 .10 0						60 Lapo ran	300 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber
		3.30.04. 2.03.03	Sub Kegiat an Penga wasan Penyal uran dan	Jumlah Laporan Pengawa san Penyalur an dan Penggung aan	12 Lapor an	12 Lapo ran	13 0.4 99. 50 0	12 Lapo ran	58. 271 .10 0						60 Lapo ran	300 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber

			Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%														
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan sinergitas bagi seluruh elemen perekonomian dan pembangunan daerah			Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100%	100%		100%							100%	2.400.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

	Terjaganya ketertiban umum, ketentr aman masyarakat dan keindahan lingkungan			Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100%	100%		100%										
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100%	100%	407.67.000	78%	197.961.000						100%	2.400.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaks	Prosentase Koordinasi	100%	100%	407.5	100%	169.04						100%	2.400.000.000	Bagian Perekonomian	Kabupaten

			anaan Kebija kan Pereko nomia n	si, Pemanta uan dan Evaluasi serta Pembina an Administ rasi Bagian Perekon omian dan SDA			67. 00 0		5.0 00							000 .00 0	n dan SDA	Jem ber
		4.01.03. 2.01.02	Sub Kegiat an Penge ndalia n dan Distrib usi Pereko nomia n	Jumlah Dokume n Hasil Pengend alian dan Distrib usi Perekon omian	12 Lapor an	12 Lapo ran	40 7.5 67. 00 0	12 Lapo ran	169 .04 5.0 00						100 %	800 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber
		4.01.03. 2.04	Kegiat an Peman tauan Kebija kan Sumbe r Daya	Prosent a se terlaksa nanya pemanta uan kebijaka n Sumber	100%	100 %	41 3.7 80. 07 5	100 %	28. 916 .00 0						60 Lapo ran	800 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber

			Alam	Daya Alam															
		4.01.03. 2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100%	100%	413.780,075	0%	4.983.000							100%	1.600.000,000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03. 2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan	0%	0%	-	100%	28.916,000							100%	500,000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			kan Perta mbang an dan Lingku ngan Hidup	pertamb angan dan lingkung an hidup															
		4.01.03. 2.04.03	Sub Kegiat an Koordi nasi, Sinkro nisasi dan Evalua si Kebija kan Energi dan Air	Prosent a se terlaks ananya koordina si, sinkrosi asi dan evaluasi kebijaka n energi dan air	0%	0%	-	0%	-							100 %	600 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber
	Mening katnya kepatuh an penyele nggaraan pemerit ah daerah sesuai			Prosent a se tingkat pemenu han kebutuh an dasar PD	100%	100 %		100 %								100 %	2.4 90. 000 .00 0	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber

	peraturan perundang-undangan yang berlaku																	
		4.01.01	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%	100%	278.6900	100%	274.918.200						100%	2.490.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%	100%	11.8500	100%	6.732.000						100%	55.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			Daerah																
		4.01.01. 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	9.030.000	6 Laporan	5.358.800							30 Laporan	40.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	6 Laporan	6 Laporan	2.158.500	6 Laporan	1.373.200							30 Laporan	15.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	12 Dokumen	12 Dokumen	207869.000	12 Dokumen	218.886.700						60 Dokumen	1.500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	207869.000	12 Dokumen	218.886.700						60 Dokumen	1.500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum	Prosentase tingkat pemenuhan	1 paket	1 paket	5.000.000	0	1.336.500						8 paket	55.000.000	Bagian Perekonomian dan	Kabupaten Jem

			Perangkat Daerah	kebutuhan dasar PD			0									0	SDA	ber
		4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	0	-	0	-						3 paket	30.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	1.336.500						5 paket	25.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar	0%	0%	-	0%	-						3 paket	500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			h Penun- jang Urusa- n Pemer- intah Daera- h	PD															
		4.01.01. 2.07.06	Sub Kegiat- an Penga- daan Peralat- an dan Mesin Lainny- a	Prosent- a tingkat pemenu- han kebutuh- an dasar PD	0%	0%	-	0%	-							3 pake- t	500 .00 0.0 00	Bagian Pereko- nomia- n dan SDA	Kab- upat- en Jem- ber
		4.01.01. 2.08	Kegiat- an Penye- diaan Jasa Penun- jang Urusa- n Pemer- intah- an Daera	Prosent- a tingkat pemenu- han kebutuh- an dasar PD	100%	100 %	14. 22 1.5 00	100 %	12. 357 .00 0							100 %	80. 000 .00 0	Bagian Pereko- nomia- n dan SDA	Kab- upat- en Jem- ber

			h															
		4.01.01. 2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	14.22.15.00	12 laporan	12.357.000						12 Laporan	80.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%	100%	40.19.00.00	100%	35.606.000						100%	200.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	1 Unit	19.68.00	1 Unit	19.000.00						1 unit	100.000.00	Bagian Perekonomian dan	Kabupaten Jem

			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			00		0							00	SDA	ber	
		4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20.510.00	20 Unit	16.606.00						20 unit	100.000.00	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
Meningkatkan investas			Prosentase Koordinasi		100%	100%	1.647.	100%	1.893.						100%	1.900.	Bagian Perekonomian	Kabupaten

i dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja				si, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perencanaan dan SDA			69 0.5 00		173 .20 0							000 .00 0	n dan SDA	Jember
Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)				Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perencanaan dan SDA	100%	100%	1.6 47. 69 0.5 00	100%	1.8 93. 173 .20 0						100%	1.9 00. 000 .00 0	Bagian Perencanaan dan SDA	Kabupaten Jember

		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100%	100%	395.305.000	100%	260.534.200							100%	1.900.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100%	100%	395.305.000	100%	260.534.200							100%	1.900.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

		4.01.03. 2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	12 Dokumen	395.000	12 Dokumen	212.136.200						60 Dokumen	1.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03. 2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembentukan	0	0	-	0	-						12 Dokumen	500.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			ntukan BLUD	BLUD															
		4.01.03. 2.01.05	Sub Kegiat an Koordi nasi, Sinkro nisasi, Monit oring dan Evalua si Kebija kan Pendiri an BUMD	Jumlah Dokume n Hasil Koordina si, Sinkroni sasi, dan Evaluasi Kebijaka n Pendiria n BUMD	0	0	-	4 Doku men	48. 398 .00 0							16 Doku men	400 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber
	Mening katnya jumlah dan kualitas usaha mikro	3.30.07	PROG RAM PENG GUNA AN DAN PEMA SARAN PROD UK DALA M NEGER	Jumlah UMKM yang Melaksa nakan Promosi Pengguna an Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupat	100 UMK M	100 UMK M	1.2 27. 14 5.5 00	100 UMK M	1.6 04. 884 .00 0							500 UMK M	10. 000 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber

			I	en/Kota															
		3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMK M	100 UMK M	1.27.145.500	100 UMK M	1.604.884.000							500 UMK M	10.000.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		3.30.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMK M	100 UMK M	1.27.145.500	100 UMK M	1.604.884.000							500 UMK M	10.000.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			t Kabup aten/K ota															
		4.01.03	PROG RAM PEREK ONOM IAN DAN PEMB ANGU NAN	Prosent se Koordin asi, Pemanta uan dan Evaluasi serta Pembina an Administ rasi Bagian Perekon omian dan SDA	100%	100 %	25. 24 0.0 00	100 %	27. 755 .00 0						100 %	150 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber
		4.01.03. 2.01	Kegiat an Pelaks anaan Kebija kan Pereko nomia n	Prosent se Koordin asi, Pemanta uan dan Evaluasi serta Pembina an Administ rasi Bagian	100%	100 %	25. 24 0.0 00	100 %	27. 755 .00 0						100 %	150 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber

				Perekonomian dan SDA															
		4.01.03. 2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Laporan	12 Laporan	25.240.00	12 Laporan	27.755.000							60 Laporan	150.000.00	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBAUNGAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA :				Indikator Tujuan : Meningkatkan tertib administrasi pembangunan Indikator	100%	100%		100%								100%	21.171.0833	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
				Meningkatkan pelayanan administrasi															

dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan Pendalian pembangunan serta peningkatan pelayanan pengelolaan pengadaan barang / jasa pemerintah																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		4.01.01	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Kantor	100%	100%	2.240.314.500	100%	2.236.858.500						100%	15.896.559.328	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	% Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan/ Honorarium dan Laporan Keuangan	100%	100%	905.183.000	100%	1.165.878.000						100%	8.022.984.778	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
				% Pelayanan Pengelolaan													Bag. AP dan PBJ	

				Pengada an Barang dan Jasa Pemerin tah Secara Elektroni k														
				% Tersedia nya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanis me Pelaksan aan APBD Indikator														Bag. AP dan PBJ
		4.01.01. 2.02.02	Penye diaan Admin istrasi Pelaks anaan Tugas ASN	Terpenu hinya Pembay aran Honorari um 12 Bulan	12 Bulan	12 Bula n	59 2.1 03. 00 0	12 Bula n	851 .31 8.0 00						100 %	5.7 89. 484 .52 2	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber

		4.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik, Non Fisik dan Anggaran OPD	72 OPD	72 OPD	31 3.0 80. 00 0	72 OPD	314 .56 0.0 00							100 %	2.2 33. 500 .25 6	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100 %	73 6.2 41. 50 0	100 %	302 .74 0.5 00							100 %	2.5 84. 502 .52 7	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Pengadaan	10 Paket	10 Pake t	18 7.2 00. 00 0	10 Pake t	168 .33 5.0 00							100 %	1.2 14. 902 .00 9	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Pengadaan	15 Paket	15 Pake t	45 0.0 15. 15	15 Pake t	52. 054 .80 0							100 %	767 .81 4.9 09	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem

			Perlen gkapa n Kantor				0											ber
		4.01.01. 2.06.04	Penye diaan Bahan Logisti k Kantor	Jumlah Paket Pengada an	4 Paket	4 Pake t	99. 02 6.3 50	4 Pake t	82. 350 .70 0						100 %	601 .78 5.6 09	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.08	Penye diaan Jasa Penunj ang Urusa n Pemer intaha n Daera h	% Pemenu han Jasa Pelayana n & Pemelih araan Sarana dan Prasaran a Kantor	100%	100 %	39 9.2 30. 00 0	100 %	575 .88 0.0 00						100 %	3.9 15. 034 .98 8	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.08.04	Penye diaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor	Terpenu hinya Pembay aran Horonari um / Gaji Tenaga Non ASN dan	12 Bulan	12 Bula n	31 1.0 25. 00 0	12 Bula n	486 .77 5.0 00						100 %	3.2 82. 835 .05 3	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber

				Mamin Kebutuh an Pegawai (12 Bulan)															
		4.01.01. 2.08.02	Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik	Terpenu hinya Pembay aran Biaya Telepon (12 Bulan)	12 Bulan	12 Bula n	5.2 80. 00 0	12 Bula n	5.2 80. 000							100 %	37. 514 .92 8	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.08.01	Penye diaan Jasa Surat Menyu rat	Terpenu hinya Penyedia an Materai dan Buku Cek Bank	12 Bulan	12 Bula n	2.9 25. 00 0	12 Bula n	3.8 25. 000							100 %	26. 277 .00 8	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.08.03	Penye diaan Jasa Perala tan dan Perlen gkapa	Jumlah Paket Pemelih araan Peralata n Kerja	12 Bulan	12 Bula n	80. 00 0.0 00	12 Bula n	80. 000 .00 0							100 %	568 .40 8.0 00	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber

			n Kantor															
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	100%	63.610.00	100%	70.410.00						100%	493.470.091	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	20.615.00	1 Unit	24.865.00						100%	172.418.312	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

			Kendaraan Dinas Jabatan																
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kantor Yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	42.995.000	9 Unit	45.545.000							100 %	321.051.780	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan	100%	100 %	136.000	100 %	121.950.000							100 %	880.566.945	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

			h	an Dinas														
		4.01.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terselenggara Bimtek Aparatur Negara	4 Paket	4 Paket	13 6.0 50. 00 0	4 Paket	121 .95 0.0 00						100 %	880 .56 6.9 45	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PENGANGUNAN	% Pemenuhan Fasilitas Penyusunan Program dan Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa	100%	100 %	2.9 62. 72 7.0 00	100 %	3.0 26. 731 .00 0						100 %	21. 171 .57 0.8 33	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.03. 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pemb	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk	3 Buku	3 Buku	46 2.9 60. 00	3 Buku	461 .41 0.0 00						100 %	3.2 79. 914 .19	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem

			nguna n	Teknis, Prosedur dan Mekanis me Pelaksan aan APBD			0								1		ber	
		4.01.03. 2.02.01	Fasilita si Penyu sunan Progra m Pemba nguna n	3 (Tiga) Buku	3 Buku	3 Buku	46 2.9 60. 00 0	3 Buku	461 .41 0.0 00						100 %	3.2 79. 914 .19 1	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.03. 2.03	Pengel olaan Penga daan Barang dan Jasa	% Pemenu han Pembay aran Tambah an Penghasi lan/ Honorari um Kelompo k Kerja UKPBJ dan LPSE	100%	100 %	2.4 99. 76 7.0 00	100 %	2.5 65. 321 .00 0						100 %	17. 891 .65 6.6 42	Kasub bag Pengel olaan Penga daan Barang Jasa dan LPSE	Kab upat en Jem ber

		4.01.03. 2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhi Honorarium UKPBJ - 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.8 53. 46 3.0 00	12 Bulan	1.8 66. 569 .00 0							100 %	13. 249 .05 3.4 02	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE	Kabupaten Jember
		4.01.03. 2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terpenuhi Honorarium LPSE - 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	64 6.3 04. 00 0	12 Bulan	638 .20 4.0 00							100 %	4.5 42. 603 .24 0	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE	Kabupaten Jember
		4.01.03. 2.03.03	Pembiayaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	600 Orang	600 Orang	60. 54 8.0 00	600 Orang	60. 548 .00 0							100 %	100 .00 0.0 00	Kasubbag Pembiayaan & Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
BAGIAN UMUM:				Indikator Tujuan :	100%	100		100								100	41. 862	Bagian	Kabupaten

Terwujudnya pelayanan prima kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Reformasi Birokrasi		%		%							%	.17 3.5 00	Umum	en Jem ber
Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli															100 %	41. 862 .17 3.5 00		Kab upat en Jem ber

		4.01.01	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	84.64	100%	39.431							100%	41.862	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	21.54	100%	19.404							100%	17.507	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	19.66	100%	17.458							100%	15.514	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		a	Penyediaan	Prosentase	100%	100%	1.8	100%	1.9							100	1.9	Bagian	Kabupaten

			Admin istrasi Pelaks anaan Tugas ASN	Penyedia an Administ rasi Pelaksan aan Tugas ASN		%	85. 28 5.0 00	%	45. 875 .00 0						%	845 .00 0	Umum	en Jem ber
		4.01.01. 2.03	Admin istrasi Barang Milik Daera h pada Perang kat Daera h	Prosent a Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah	100%	100 %	97. 50 0.0 00	100 %	115 .50 0.0 00						100 %	17. 526 .31 4	Bagian Umum	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.03.02	Penga manan Barang Milik Daera h SKPD	Prosent a Pengam anan Barang Milik Daerah SKPD	100%	100 %	97. 50 0.0 00	100 %	115 .50 0.0 00						100 %	17. 526 .31 4	Bagian Umum	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.05	Admin istrasi Kepeg awaia n	Prosent a Administ rasi Kepegaw	90%	100 %	96 1.3 00. 00	100 %	357 .50 0.0						100 %	385 .86 6.3 69	Bagian Umum	Kab upat en Jem

			Perangkat Daerah	aian Perangkat Daerah			0		00									ber
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	961.300.00	100%	357.500.00						100%	385.866.369	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	100%	21.216.148.70	100%	7.852.925.30						100%	10.506.368.270	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Prosentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	100%	100%	184.987.00	100%	199.553.800						100%	237.773.852	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Bangunan Kantor	an Bangunan Kantor														
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	5.589.348.000	100%	573.957.200						100%	8.946.300	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	603.745.000	100%	135.727.600						100%	4.200.244.012	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	2.286.495.500	100%	1.852.163.200						100%	229.251.970	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Prosentase Penyediaan Barang	100%	100%	92.521.420	100%	244.102.5						100%	-	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Penggunaan	Cetakan dan Penggandaan			0		00									ber
		4.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	12.000.000	100%	6.000.000						100%	2.840.530.643	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Prosentase Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	100%	5.348.634.000	100%	2.002.510.000						100%	237.773.852	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Prosentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	100%	6.265.725.000	100%	2.838.911.000						100%	2.781.733.937	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			SKPD	si SKPD														
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	14.35432	100%	5.672.123.900						100%	6.488.560.304	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	387.491.000	100%	198.549.900						100%	166.078.050	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	2.717.987.160	100%	2.431.440.000						100%	2.515.991.704	Bagian Umum	Kabupaten Jember

		4.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	8.883.4572	100%	1.056.734.000						100%	1.626.637.100	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	2.365.500.00	100%	1.985.400.000						100%	2.179.853.450	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.619.740.00	100%	3.452.210.000						100%	4.630.162.835	Bagian Umum	Kabupaten Jember

		4.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	1.204.920.00	100%	954.250.00							100%	954.435.243	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	100%	100%	1.841.350.00	100%	1.078.000.000							100%	1.973.615.538	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Prosentase Pemeliharaan Mebel	100%	100%	573.469.500	100%	150.000.00						100%	99.661.200	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesini lainnya	Prosentase Pemeliharaan peralatan dan mesini lainnya	100%	100%		100%	230.000.00						100%	164.460.004	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Prosentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	100%	100%		100%	1.039.960.000						100%	1.437.990.850	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Lainnya	n Lainnya														
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	2.272.201.60	100%	1.765.075.000						100%	1.250.971.221	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	375.160	100%	207.021.225						100%	174.299.721	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakai	Prosentase Penyediaan	100%	100%	772.0	100%	456.00						100%	117.030.0	Bagian Umum	Kabupaten

			n Dinas dan Atribut Keleng kapan Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h	an Pakaian Dinas dan Atribut Kelengka pan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			50. 00 0		0.0 00							00		Jem ber	
		4.01.01. 2.11.04	Penye diaan Dana Penunj ang Opera sional Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h	Prosent a se Penyedia an Dana Penunja ng Operasio nal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100 %	1.1 25. 00 0.0 00	100 %	1.1 02. 053 .77 5							100 %	959 .64 1.5 00	Bagian Umum	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.12	Fasilita si Kerum ah tang gaan Sekret	Prosent a se Fasilitasi Kerumah tanggaan	100%	100 %	21. 54 7.7 37. 85	100 %	21. 344 .57 4.1							100 %	1.0 75. 450 .40 0	Bagian Umum	Kab upat en Jem ber

			ariat Daerah	Sekretariat Daerah			0		84									
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Prosentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100%	100%	97.85.500	100%	424.713.300						100%	618.543.300	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Prosentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100%	100%	60.49.42.000	100%	386.638.500						100%	456.907.100	Bagian Umum	Kabupaten Jember
BAGIAN ORGANISASI:				Indeks Pelayanan Publik	tidak ada data	2.75 (C)	1.159.000	3.00 (C)	1.159.000						4,51 (A-)	579.500.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
Terwujudnya penyelenggaraan				Nilai SAKIP	61,60	69.0		70.47							80,5	0	Bagian Organisasi	Kab. Jem

n pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima			Kabupaten Jember	(B)	0 (B)		(BB)								6 (A)		sasi	ber
Terwujudnya pelayanan publik yang prima yang didukung oleh tata laksana organisasi yang efektif dan efisien			% UPP yang menindaklanjuti hasil pemantauan kepatuhan standar pelayanan publik	25%	40%		50%								100 %		Bagian Organisasi	Kab. Jember

				% PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik	2%	40%		50%							100%		Bagian Organisasi	Kab. Jember
				% PD yang menerapkan ketataksanaan sesuai pedoman	25%	40%		50%							100%		Bagian Organisasi	Kab. Jember
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			% Dokumen SAKIP PD berkualitas Baik	45%	50%		75%							100%		Bagian Organisasi	Kab. Jember
	Efektivas Kelembagaan			% Hasil Monev Kelembagaan	100%	100%		100%							100%		Bagian Organisasi	Kab. Jember

	Perangkat Daerah dan Penerapan Analisis Jabatan			yang ditindaklanjuti														
				% kompetensi jabatan sesuai pedoman	25%	75%		100%							100%		Bagian Organisasi	Kab. Jember
				% dokumen anjab/ABK sesuai pedoman	50%	75%		75%							100%		Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	rata rata capaian fasilitas penataan kelembagaan, yanblik, talak, akuntabi	38%	60%	1.159.000.00	70%	1.159.000.00						90%	5.975.000.00	Bagian Organisasi	Kab. Jember

			h Kabup aten / Kota	litas dan RB															
		4.01.01. 13.	Kegiat an Penata an Organi sasi	1. % Hasil Monev Kelemba gaan yang ditindakl anjuti 2. % kompete nsi jabatan sesuai pedoma n 3. % dokume n anjab/A BK sesuai pedoma n 4. % Dokume n SAKIP PD berkualit as Baik 5. % UPP	Kondi si 1 : 100% Kondi si 2 : 25% Kondi si 3 : 50% Kondi si 4 : 45% Kondi si 5 : 25% Kondi si 6 : 2% Kondi si 7 : 25%	Targ et 1 : 100 % Targ et 2 : 75% Targ et 3 : 75% targ et 4 : 50% targ et 5 : 40% targ et 6 : 40% targ et 7 : 40%	82 0.0 00. 00 00 0	Targ et 1 : 100 % Targ et 2 : 100 % Targ et 3 : 75% targ et 4 : 75% targ et 5 : 50% targ et 6 : 50% targ et 7 : 50%	820 .00 0.0 00							Targ et 1 : 100 % Targ et 2 : 100 % Targ et 3 : 100 % targe t 4 : 100 % targe t 5 : 100 % targe t 6 : 100 % targe t 7 : 100 %	4.1 00. 000 .00 0	Bagian Organi sasi	Kab. Jem ber

				yang menindaklanjuti hasil pemantauan kepatuhan SPP 6. % PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik 7. % PD yang menerapkan ketataksanaan sesuai pedoman														
		4.01.01.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	1700000	2	1700000						10 dok	8500000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

			Laksana																
		4.01.01.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah dokumen Pengelolaan kelembagaan dan anjab	2	2	2500.0000	2	2500.0000							10 dok	1.250.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.13.01	Sub Kegiatan Pengolaan Kelembagaan dan Anjab	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan RB	2	2	4000.0000	2	4000.0000							10 dok	2.000.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	% dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat	100%	100%	3400.0000	100%	34000.0000							100%	1700.0000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

			daerah	waktu sesuai pedoma n														
		4.01.01. 2.01.02	Sub Kegiat an Koordi nasi dan Penyu sunan Doku men RKA- SKPD	Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil	1	1	17. 00 0.0 00	1	17. 000 .00 0						5 dok	85. 000 .00 0	Bagian Organi sasi	Kab. Jem ber
		4.01.01. 2.01.03	Sub Kegiat an Koordi nasi dan Penyu sunan Doku men Perub ahan RKA- SKPD	Jumlah Dokume n Perubah an RKA- SKPD dan laporan hasil	1	1	17. 00 0.0 00	1	17. 000 .00 0						5 dok	85. 000 .00 0	Bagian Organi sasi	Kab. Jem ber
		4.01.01.	Kegiat an	% dokume	100%	100	17 0.0	100	170 .00						100	850 .00	Bagian Organi	Kab. Jem

		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu dan sesuai pedoman		%	00.000	%	0.000						%	0.000	sasi	ber
		4.01.01.2.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1700.000	12	1700.000						60 dokumen	850.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100%	100%	65.000,00	100%	65.000,00						100%	325.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

		4.01.01. 2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	65. 00 0.0 00, 00	1	65. 000 .00 0,0 0							5 pake t	325 .00 0.0 00	Bagian Organi sasi	Kab. Jem ber
		4.01.01. 2.07	Kegiatan Penga daan Barang Milik Daera h Penunj ang Urusa n Pemer intaha n Daera h	% pemenu han kebutuh an pengada an BMD penunja ng urusan pemerin tahan daerah	100%	100 %	20. 00 0.0 00	100 %	20. 000 .00 0							100 %	100 .00 0.0 00	Bagian Organi sasi	Kab. Jem ber
		4.01.01. 2.07.06	Sub kegiatan Penga daan Peralat an	Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang	0	0	20. 00 0.0 00	3	20. 000 .00 0							10 buah	100 .00 0.0 00	Bagian Organi sasi	Kab. Jem ber

			dan mesin Lainnya	disediakan															
		4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	50.000.00	100%	50.000.00							100%	500.000.00	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	20	50.000.00	20	50.000.00							100	500.000.00	Bagian Organisasi	Kab. Jember

BAGIAN PROTO KOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN:					100%	100%	4.5 11.65 8.850	100%	6.2 57.914 .592						100%	6.0 67.189 .145	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
Meningkatnya pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan					100%	100%	4.5 11.65 8.850	100%	6.2 57.914 .592						100%	6.0 67.189 .145	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah			Prosentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	100%	100%	4.5 11.65 8.850	100%	6.2 57.914 .592						100%	6.0 67.189 .145	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

		4.01.01	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase kepuasan pimpinan daerah terhadap pelayanan keprotokolan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program pimpinan daerah	100%	100%	4.511.658.850	100%	6.257.914.592						100%	6.067.189.145	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100%	100%	478.685.000	100%	1.103.676.800						100%	1.045.368.477	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah terpenuhinya honor	100%	12 bulan	478.685.000	12 bulan	1.103.676.800						100%	1.045.368.477	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dan lembur			0		0							7		ber
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	504.605.300	100%	637.510.800						100%	624.560.151	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100%	12 bulan	101.943.000	12 bulan	215.720.700						100%	214.907.000	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistinya	Jumlah bulan tersedianya	100%	12 bulan	233.015.	12 bulan	320.808.1						100%	308.671.1	Bagian Prokopim	Kabupaten Jem

			k Kantor	makana n dan minuma n serta bahan kebersih an kantor			50 0		00							51		ber
		4.01.01. 2.06.05	Penye diaan Barang Cetaka n dan Pengg andaa n	Jumlah bulan tersedia nya barang cetakan dan penggan daan	100%	12 bula n	15 4.4 54. 80 0	12 bula n	100 .98 2.0 00						100 %	100 .98 2.0 00	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.06.06	Penye diaan Bahan Bacaa n dan Peratu ran Perun dang- undan gan	Jumlah bulan Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- undanga n	100%	12 bula n	15. 19 2.0 00	-	-						100 %	15. 192 .00 0	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.08	Penye diaan Jasa Penunj	Presenta se pemenu han	100%	100 %	46. 00 0.0	100 %	54. 005 .24						100 %	52. 361 .35	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem

			ang Urusa n Pemer intaha n Daera h	kebutuh an pemelih araan sarana prasaran a kerja sesuai dengan standar daerah			00		2							3		ber	
		4.01.01. 2.08.02	Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedia nya jasa komunik asi, sumber daya air dan listrik	100%	12 bula n	46. 00 0.0 00	12 bula n	54. 005 .24 2							100 %	52. 361 .35 3	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.09	Pemeli haraan Barang Milik Daera h Penunj ang Urusa n Pemer intaha	Presenta se pemenu han kebutuh an pemelih araan sarana prasaran a kerja sesuai	100%	100 %	16 7.7 43. 50 0	100 %	347 .69 1.1 50							100 %	339 .84 0.3 00	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem ber

			n Daerah	dengan standar daerah														
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan jabatan roda 4 yang dipelihara dan dibayar pajaknya	100%	1 unit	115.850,00	-	-						100%	115.865,500	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah kendaraan jabatan roda 4 yang dipelihara dan	100%	12 unit	36.216,00	100%	312.691,50						100%	306.274,700	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayar pajaknya														
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terlaksanakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	45 kali	15.662.000	100%	35.000.000						100%	33.565.600	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	100%	100%	3.314.625.050	100%	4.115.030.600						100%	4.005.058.864	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			an	Pimpina n														
		4.01.01. 2.14.01	Fasilita si Keprot okolan	Jumlah kegiatan pelaksana an Fasilitasi Keproto kolan	100%	800 kegi atan	1.1 51. 04 1.1 50	800 kegi atan	1.3 91. 134 .80 0						100 %	1.3 81. 235 .06 4	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.14.03	Pendo kumen tasian Tugas Pimpin an	Jumlah kegiatan pelaksana an Pendoku mentasi an Tugas Pimpina n	100%	800 kegi atan	2.1 63. 58 3.9 00	800 kegi atan	2.7 23. 895 .80 0						100 %	2.6 23. 823 .80 0	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem ber
SESUDAH PERUBAHAN																		
Tersedi anya Laporan Penyele nggaraan Pemer intah Daerah (LPPD)				Ketersed iaan Laporan Penyele nggaraan Pemer intah Daerah (LPPD)	90%					98,2 9%		98,3 1%		98,37 %		99,5 4%	Bag. Tape m	Kab upa ten Jem ber

			KOTA																
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%					100%	42.637.980	100%	42.637.980	100%	42.637.980	100%	42.637.980	Bag. Tape m	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen					2 dokumen	4.126.000	2 dokumen	4.126.000	2 dokumen	4.126.000	2 dokumen	4.126.000	Bag. Tape m	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen					1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	Bag. Tape m	Kabupaten Jember

			SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	Bag. Tape m	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen					1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	Bag. Tape m	Kabupaten Jember

				nan Dokume n DPA- SKPD															
		4.01.01. 2.01.05	Koordi nasi dan Penyu sunan Perub ahan DPA- SKPD	Jumlah Dokume n Perubah an DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n Perubah an DPA- SKPD	1 doku men					1 doku men	4.56 0.20 0	1 doku men	4.56 0.20 0	1 doku men	4.56 0.20 0	1 doku men	4.5 60. 200	Bag. Tape m	Kab upa ten Jem ber
		4.01.01. 2.01.06	Koordi nasi dan Penyu sunan Lapora n Capaia n Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1 doku men					1 doku men	4.56 0.20 0	1 doku men	4.56 0.20 0	1 doku men	4.56 0.20 0	1 doku men	4.5 60. 200	Bag. Tape m	Kab upa ten Jem ber

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%				100%	413,780,075.00	100%	413,780,075.00	100%	413,780,075.00	100%	413,780,075.00	Bag. Tape m	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen				12 dokumen	413,780,075.00	12 dokumen	413,780,075.00	12 dokumen	413,780,075.00	12 dokumen	413,780,075.00	Bag. Tape m	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada PD	100%					100%	7.100.000	100%	7.100.000	100%	7.100.000	100%	7.100.000	Bag. Tape m	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen					2 dokumen	3.420.000	2 dokumen	3.420.000	2 dokumen	3.420.000	2 dokumen	3.420.000	Bag. Tape m	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan					1 laporan	3.680.000	1 laporan	3.680.000	1 laporan	3.680.000	1 laporan	3.680.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.01 .2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%					100%		100%			100%		492.620.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01 .2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket					2 paket		2 paket		2 paket		2 paket	2.145.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket					12 paket		12 paket		12 paket		12 paket	3.547.000	Bag. Tape m	Kabupaten Jember
		4.01.01 .2.06.0	Penyediaan Baran	Jumlah Paket Barang	5 paket					5 pake		5 pake		5 paket		5 pake	103.448.	Bag. Tapem	Kabupaten

		5	g Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					t	000	t	000		000	t	8.000		Jember
		4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan				2 laporan	62.880.000	2 laporan	62.880.000	2 laporan	62.880.000	2 laporan	62.880.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan				12 laporan	320.600.000	12 laporan	320.600.000	12 laporan	320.600.000	12 laporan	320.600.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan	100%				100%	163.680.000	100%	163.680.000	100%	163.680.000	100%	163.680.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah sesuai kebutuhan PD															
		4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket					2 paket	35.260.000	2 paket	35.260.000	2 paket	35.260.000	2 paket	35.260.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit					4 unit	128.420.000	4 unit	128.420.000	4 unit	128.420.000	4 unit	128.420.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan	100%					100%	25.650.000	100%	25.650.000	100%	25.650.000	100%	25.650.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			n Daerah	pemerintahan daerah															
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan					2 laporan	15.650.000	2 laporan	15.650.000	2 laporan	15.650.000	2 laporan	15.650.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan					2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90%					100%	79.170.000	100%	79.170.000	100%	79.170.000	100%	79.117.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			intaha Daera h																
		4.01.01 .2.09.0 1	Penye diaan Jasa Pemel iharaa n, Biaya Pemel iharaa n, dan Pajak Kenda raan Peror angan Dinas atau Kenda raan Dinas Jabat an	Jumlah Kendar aan Peroran gan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabatan yang Dipeliha ra dan dibayar kan Pajakny a	7 unit					7 unit	55.0 10.0 00	7 unit	55.0 10.0 00	7 unit	55.0 10.0 00	7 unit	55. 010 .00 0	Bag. Tapem	Kab upa ten Jem ber
		4.01.01 .2.09.0 5	Pemel iharaa n Mebe	Jumlah Mebel yang Dipeliha	10 unit					10 unit	12.7 45.0	10 unit	12.7 45.0	10 unit	12.7 45.0	10 unit	12. 745 .00	Bag. Tapem	Kab upa ten Jem

			l	ra						00		00		00		0		ber
		4.01.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit				18 unit	11.362.000	18 unit	11.362.000	18 unit	11.362.000	18 unit	11.362.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01 .2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	90%				100 %	1.965.254.500	100 %	2.245.558.500	100%	2.317.256.830	100 %	2.493.544.765	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01 .2.13.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	90%				100 %	1.965.254.500	100 %	2.245.558.500	100%	2.317.256.830	100 %	2.493.544.765	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			h																
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fungsi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	84,15 %					98,25 %	1.325.224.580	98,73 %	1.696.574.400	99,02 %	1.882.563.920	99,25 %	2.024.325.560	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	93,30 %					96,14 %	823.454.680	96,60 %	956.874.430	97,35 %	1.132.486.550	97,80 %	1.245.636.800	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.02.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	2 dokumen					2 dokumen	263.558.000	2 dokumen	325.410.200	2 dokumen	440.120.900	2 dokumen	505.654.740	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			n	rasi Pemerin tahan															
		4.01.02. 02.01.0 2	Pengel olaan Admin istrasi Kewila yahan	Jumlah Dokume n Hasil Pengelol aan Administ rasi Kewilaya han	3 doku men					2 doku men	356. 228. 700	2 doku men	482. 890. 230	2 doku men	560. 334. 700	2 doku men	689 .85 8.4 20	Bag. Tapem	Kab upa ten Jem ber
		4.01.02. 02.01.0 3	Fasilita si Pelaks anaan otono mi daerah	Jumlah Dokume n Hasil Fasilitasi Pelaksan aan Otonomi Daerah	3 doku men					2 doku men	377. 446. 210	2 doku men	540. 556. 300	2 doku men	697. 560. 250	2 doku men	810 .75 0.2 00	Bag. Tapem	Kab upa ten Jem ber
		4.01.02. 2.04	Fasilita si Kerjas ama Daera h	Persenta se kesepak atan dan perjanjia n kerjasam a yang ditindakl anjuti	75%					100 %	236 .88 9.1 40	100 %	397 .87 5.6 00	100%	553 .68 6.9 00	100 %	647 .75 2.4 10	Bag. Tape m	Kab upa ten Jem ber

		4.01.02. 2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50 dokumen					50 dokumen	64.180.000	50 dokumen	64.180.000	50 dokumen	64.180.000	50 dokumen	64.180.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02. 2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen					1 dokumen	82.490.000	1 dokumen	82.490.000	1 dokumen	82.490.000	1 dokumen	82.490.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02. 2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan					1 laporan	11.780.000	1 laporan	11.780.000	1 laporan	11.780.000	1 laporan	11.780.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat			Persentase kualitas kehidupan beragama dan kerukun	100%					95%		95%		95%		95%		Bag. Kesra	Kabupaten Jember

	dan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama			an antar umat beragama														
		4.01.01	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang tercukupi	90%				90%	2.600.000	90%	2.600.000	90%	2.600.000	90%	10.400.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang	90%				100%	625.000.000	100%	625.000.000	100%	625.000.000	100%	2.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			h	terkelola															
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90%					12 laporan	625.000.000	12 laporan	625.000.000	12 laporan	625.000.000	60 Laporan	2.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.20.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dikelola	80%					85%	931.250.000	85%	931.250.000	85%	931.250.000	85%	3.725.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	80%					2 paket	125.000.000	2 paket	125.000.000	2 paket	125.000.000	10 Paket	500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan	80%					12 pake	250.000.	12 pake	250.000.	12 paket	250.000.	60 Pake	1.000.	Bagian Kesra	Kabupaten

			Logistik Kantor	Logistik Kantor yang disediakan					t	000	t	000		000	t	000		Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	80%				1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	5 Paket	100.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelesaian Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80%				12 laporan	531.250.000	12 laporan	531.250.000	12 laporan	531.250.000	60 Laporan	2.125.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.20.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemer	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan	100%				100%	37.500.000	100%	37.500.000	100%	37.500.000	100%	150.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			intaha Daera h	sarana prasaran a kerja sesuai dengan standar daerah														
		4.01.01. 2.08.01	Penye diaan Jasa Surat Menyu rat	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyura t	100%				12 lapor an	25.0 00.0 00	12 lapor an	25.0 00.0 00	12 lapora n	25.0 00.0 00	60 Lapo ran	100 .00 0.0 00	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.08.02	Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik	Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%				12 lapor an	12.5 00.0 00	12 lapor an	12.5 00.0 00	12 lapora n	12.5 00.0 00	60 Lapo ran	50. 000 .00 0	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 20.9	Pemeli haraan Barang Milik Daera h Penunj ang	Persenta se barang milik daerah yang terpeliha	75%				85%	75.0 00.0 00	85%	75.0 00.0 00	85%	75.0 00.0 00	85%	300 .00 0.0 00	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber

			Urusa n Pemer intaha n Daera h	ra														
		4.01.02. 2.02.01	Penye diaan Jasa Pemeli haraan , Biaya Pemeli haraan dan Pajak Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kenda raan Dinas Jabata n	Jumlah Kendara an Perorang an Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayark an pajaknya	75%				8 Kend araan	37.5 00.0 00	8 Kend araan	37.5 00.0 00	8 Kenda raan	37.5 00.0 00	40 Kend araan	150 .00 0.0 00	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.09.06	Pemeli haraan Peral atan dan	Jumlah Peralata n dan Mesin Lainnya	75%				15 Peral atan	37.5 00.0 00	15 Peral atan	37.5 00.0 00	15 Peral atan	37.5 00.0 00	75 Peral atan	150 .00 0.0	Bagian Kesra	Kab upat en Jem

			Mesin Lainnya	yang Dipelihara												00		ber
		4.01.02	PROG RAM PEME RINTA HAN DAN KESEJA HTERA AN RAKYA T	Persenta se hasil kebijaka n yang ditindakl anjuti di bidang Kesejaht eraan Rakyat, pelayana n dasar, permohon an bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual, kegiatan keagama an dan pembina an kehidup an beragam a	100%				100 %	31.6 25.0 00.0 00	100 %	31.6 25.0 00.0 00	100%	31.6 25.0 00.0 00	100 %	126 .50 0.0 00. 000	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber

		4.01.02.20.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bina Mental Spritual, Kesejahteraan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial yang Terlaksana	100%					100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100%					16 Dokumen	3.125.000	16 Dokumen	3.125.000	16 Dokumen	3.125.000	80 Dokumen	12.500.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	100%					4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.000.000	20 Dokumen	100.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial meliputi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Belanja Jasa, Tenaga Administrasi, Belanja bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu (guru ngaji)														
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi,	100%				3 Dokumen	1.875.000,00	3 Dokumen	1.875.000,00	3 Dokumen	1.875.000,00	15 Dokumen	7.500.000,00	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat meliputi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan												0		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

				Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan Meningkatnya Jumlah Guru															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Ngaji dan Penyuluh Agama														
	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan			Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi					100 %		100 %		100%		100 %		Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang tercukupi	100%				100 %	1.289.012.200,00	100 %	1.366.626.000,00	100%	1.388.626.000,00	100 %	939.357.660,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.	Perencanaan,	Persentase	100%				100	29.1	100	29.1	100%	29.1	100	16.	Bagian	Kabupaten

		2.01	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun					%	36.000,00	%	36.000,00		36.000,00	%	196.000,00	Hukum	en Jember
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 dokumen				7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	3.221.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	7 dokumen										7 dokumen	6.449.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

			RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 dokumen				7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	297.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	7 dokumen				7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	6.299.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

				n Perubah an DPA- SKPD														
		4.01.01. 2.02	Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h	Persenta se administ rasi keuanga n yang terkelola	100%				100 %	425. 208. 000, 00	100 %	425. 208. 000, 00	100%	425. 208. 000, 00	100 %	599 .81 8.4 15, 00	Bagian Hukum	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.02.02	Penye diaan Admin istrasi Pelaks anaan Tugas ASN	Jumlah Dokume n Hasil Penyedia an Administ rasi Pelaksan aan Tugas ASN	12 lapora n				12 lapor an	425. 208. 000, 00	12 lapor an	425. 208. 000, 00	12 lapora n	425. 208. 000, 00	12 lapor an	599 .81 8.4 15, 00	Bagian Hukum	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.05	Admin istrasi Kepeg awaia n Perang kat Daera	Terpenu hinya pakaian dinas beserta perlengk apannya	0%				100 %	39.2 00.0 00,0 0	100 %	41.0 00.0 00,0 0	100%	41.0 00.0 00,0 0	100 %	41. 000 .00 0,0 0	Bagian Hukum	Kab upat en Jem ber

			h																
		4.01.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0					30 paket	39.200.000,00	30 paket	41.000.000,00	30 paket	41.000.000,00	30 paket	41.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dikelola	100%					100%	600.916.200,00	100%	623.330.000,00	100%	645.330.000,00	100%	418.343.245,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor guna menunjang kebutuhan ASN yang tersedia	100%					1 unit	21.629.600,00	1 paket	30.000.000,00	1 paket	35.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

		4.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0					1 paket	14.999.900,00	1 paket	20.000,00	1 paket	25.000,00	1 paket	30.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%					1 paket	181.546.700,00	1 paket	190.000,00	1 paket	200.000,00	1 paket	12.397.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	0					1 paket	12.400,00	1 paket	13.000,00	1 paket	15.000,00	1 paket	15.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	100%					12 laporan	370.330,00	12 laporan	370.330,00	12 laporan	370.330,00	12 laporan	310.946.245,	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

			dan Konsultasi SKPD	si dan konsultasi SKPD												00		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa surat menyurat, jasa telepon dan jasa tenaga administrasi (non ASN)	0%				100 %	154.552.000,00	100 %	207.952.000,00	100%	207.952.000,00	100 %	207.952.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0%				12 laporan	5.250.000,00	12 laporan	9.250.000,00	12 laporan	9.250.000,00	12 laporan	9.250.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	0%				12 laporan	2.400.000,00	12 laporan	2.400.000,00	12 laporan	2.400.000,00	12 laporan	2.400.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

			Listrik	Listrik yang Disediakan															
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0%					12 laporan	146.902.000,00	12 laporan	196.302.000,00	12 laporan	196.302.000,00	12 laporan	196.302.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	0%					100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan	0%					20 unit	40.000.000,00	20 unit	40.000.000,00	20 unit	40.000.000,00	20 unit	40.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten

			tan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara						00,00		00,00		00,00		.000,00		Jember
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terselenggaranya penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum	100%				100%	3.031.812.600,00	100%	3.031.812.600,00	100%	3.031.812.600,00	70%	1.929.954.750,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.05	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	100%				100%	3.031.812.600,00	100%	3.031.812.600,00	100%	3.031.812.600,00	70%	1.929.954.750,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Produk Hukum yang	100%				673 dokumen	626.647.000,	673 dokumen	626.647.000,	673 dokumen	626.647.000,	650 dokumen	283.168.5	Bagian Hukum	Kabupaten Jem

			Produk Hukum Daerah	dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD						00		00		00		50,00		ber	
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu	100%					113 kasus	2.290.960,00	113 kasus	2.290.960,00	113 kasus	2.290.960,00	168 kasus	1.568.036,200,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang terpublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat	100%					600 dokumen	114.200.000,00	600 dokumen	114.200.000,00	600 dokumen	114.200.000,00	160 dokumen	78.750,000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

			m	kat															
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik			Persentase peningkatan sinergitas di bidang perekonomian dan SDA, bidang administrasi pembangunan, serta PBJ	100%					100%		100%		100%				Bagian Perekonomian dan SDA Bagian AP dan PBJ	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembina	100%					100%	6.429.500	100%	6.615.000	100%	6.700.000	100%	28.262.654.775	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			NAN	an Administ rasi Bagian Perekon omian dan SDA														
		4.01.03. 2.01	Pelaks anaan Kebija kan Pereko nomia n	Persenta se Koordina si, Pemanta uan dan Evaluasi serta Pembina an Administ rasi Bagian Perekon omian dan SDA	100%				100 %	6.18 0.03 8.90 0	100 %	6.29 5.00 0.00 0	100%	6.36 0.00 0.00 0	100 %	26. 545 .48 5.1 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber
		4.01.03. 2.01.01	Koordi nasi, Sinkro nisasi, Monit oring dan Evalua si Kebija	Jumlah Dokume n Hasil Koordina si, Sinkroni asi, Monitori ng dan Evaluasi	12 Doku men				12 Doku men	371. 463. 800	12 Doku men	400. 000. 000	12 Doku men	400. 000. 000	60 Doku men	2.1 78. 905 .00 0	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber

			kan Pengel olaan BUMD dan BLUD	Kebijaka n Pengelol aan BUMD dan BLUD															
		4.01.03. 2.01.02	Penge ndalia n dan Distrib usi Pereko nomia n	Jumlah Dokume n Hasil Pengend alian dan Distribus i Perekon omian	12 Lapor an				12 Lapo ran	253. 918. 000	12 Lapo ran	275. 000. 000	12 Lapor an	300. 000. 000	72 Lapo ran	1.7 30. 530 .00 0	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber	
		4.01.03. 2.01.03	Peranc anaan dan Penga wasan Ekono mi Mikro Kecil	Jumlah Dokume n Hasil Perenca naan dan Pengawa san Ekonomi Mikro Kecil	12 Lapor an				12 Doku men	5.06 6.40 8.10 0	12 Doku men	5.10 0.00 0.00 0	12 Doku men	5.10 0.00 0.00 0	72 Lapo ran	20. 419 .40 3.1 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber	
		4.01.03. 2.01.04	Koordi nasi, Sinkro nisasi, Monit	Jumlah Dokume n Hasil koordinasi, ,	0				4 Doku men	203. 669. 000	4 Doku men	220. 000. 000	4 Doku men	240. 000. 000	16 Doku men	923 .66 9.0	Bagian Pereko nomia n dan	Kab upat en Jem	

			oring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	sinkrosasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD												00	SDA	ber
		4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0				4 Dokumen	284.580.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	320.000.000	20 dokumen	1.292.978.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.04	Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan Sumber	100%				100 %	249.490.600	100 %	320.000.000	100%	340.000.000	100 %	1.717.169.675	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

				Daya Alam															
		4.01.03. 2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	0				12 dokumen	194.700.600	12 dokumen	200.000.000	12 dokumen	210.000.000	36 dokumen	1.243.463.675	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember	
		4.01.03. 2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi	0				4 dokumen	54.790.000	4 dokumen	60.000.000	4 dokumen	65.000.000	20 dokumen	278.706.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember	

			si Kebija kan Perta mbang an dan Lingku ngan Hidup	asi, dan Evaluasi Kebijaka n Urusan Pertamb angan, dan Sumber Daya Mineral, Lingkung an Hidup, Kominfo, Perhubu ngan, Statistik, Persandi an														
		4.01.03. 2.04.03	Koordi nasi, Sinkro nisasi dan Evalua si Kebija kan Energi dan Air	Jumlah Dokume n Hasil Koordina si, Sinkronis asi, dan Evaluasi Kebijaka n Urusan Energi dan Air, Pekerjaa n Umum	0				0	0	4 doku men	60.0 00.0 00	4 doku men	65.0 00.0 00	12 doku men	195 .00 0.0 00	Bagian Pereko nomia n dan SDA	Kab upat en Jem ber

				dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan														
		4.01.01	PROGRAM PUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%				100%	380.604.000	100%	274.918.200	100%	274.918.200	100%	1.758.745.800	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengang	100%				100%	7.600.000	100%	8.300.000	100%	9.000.000	100%	52.620.500	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			Kinerja Peringkat Daerah	garan, dan Evaluasi yang Tersusun														
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	6 Laporan				6 Laporan	6.000.000	6 Laporan	6.500.000	6 Laporan	7.000.000	30 Laporan	41.388.800	Bagian Perencanaan dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	6 Laporan				6 Laporan	1.600.000	6 Laporan	1.800.000	6 Laporan	2.000.000	30 Laporan	11.231.700	Bagian Perencanaan dan SDA	Kabupaten Jember

				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	12 Dokumen					100 %	230.000.000	100 %	250.000.000	100%	280.000.000	100 %	1.506.755.700	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen					12 Dokumen	230.000.000	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	280.000.000	72 Dokumen	1.506.755.700	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang	1 paket					100 %	1.500.000	100 %	31.750.000	100%	32.150.000	100 %	55.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			h	terkelola															
		4.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0					0	0	1 paket	300 000 00	1 paket	300 000 00	3 paket	90.000 .00 0	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket					1 paket	150 000 0	1 paket	175 000 0	1 paket	215 000 0	6 paket	14.236 .50 0	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0%					100 %	87.5 00.0 00	100 %	87.5 00.0 00	100%	87.5 00.0 00	4 paket	350 .00 0.0 00	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			h																
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0%					1 paket	87.500.000	1 paket	87.500.000	1 paket	87.500.000	4 paket	350.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%					100%	15.504.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	100%	93.582.500	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan					12 laporan	15.504.000	12 laporan	16.000.000	12 laporan	17.000.000	72 Laporan	93.582.500	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang	Persentase barang	100%					100%	38.500.000	100%	43.000.000	100%	48.500.000	100%	258.79	Bagian Perekonomian	Kabupaten

			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah yang terpelihara						00		00		00	6.000	n dan SDA	Jember	
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit				1 Unit	21.000.000	1 Unit	24.000.000	1 Unit	27.000.000	6 unit	140.680.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

		4.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit					20 Unit	17.500.000	20 Unit	19.000.000	20 Unit	21.500.000	120 unit	118.116.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Kantor	100%					100%	2.460.540	100%	2.706.598.785	100%	2.977.258.664	100%	15.896.559.328	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dikelola	100%					100%	1.282.465.800	100%	1.410.712.380	100%	1.551.783.618	100%	8.022.984.778	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember

		4.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium 12 Bulan yang terpenuhi	12 Bulan					12 Bulan	936. 449. 800	12 Bulan	1.03 0.09 4.78 0	12 Bulan	1.13 3.10 4.25 8	100 %	5.7 89. 484 .52 2	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik, Non Fisik dan Anggaran OPD	72 OPD					72 OPD	346. 016. 000	72 OPD	380. 617. 600	72 OPD	418. 679. 360	100 %	2.2 33. 500 .25 6	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%					100 %	333. 014. 550	100 %	366. 316. 005	100%	402. 947. 606	100 %	880 .56 6.9 45	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember

		4.01.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Aparatur Negara yang Terlaksana	4 Paket					4 Paket	185.168.500	4 Paket	203.685.350	4 Paket	224.053.885	100 %	880.566.945	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dikelola	100%					100 %	57.260.280	100 %	62.986.308	100%	69.284.939	100 %	2.584.502.527	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Pengadaan	10 Paket					10 Paket	90.585.770	10 Paket	99.644.347	10 Paket	109.608.782	100 %	1.214.902.009	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember

		4.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	15 Paket					15 Paket	633.468.000	15 Paket	696.814.800	15 Paket	766.496.280	100 %	767.814.909	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	4 Paket					4 Paket	535.452.500	4 Paket	588.997.750	4 Paket	647.897.525	100 %	601.785.609	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%					100 %	5.808.000	100 %	6.388.800	100%	7.027.680	100 %	3.915.034.988	Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember

		4.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honorarium / Gaji Tenaga Non ASN dan Mamin Kebutuhan Pegawai (12 Bulan) yang terpenuhi	12 Bulan					12 Bulan	4.20 7.50 0	12 Bulan	4.62 8.25 0	12 Bulan	5.09 1.07 5	100 %	3.2 82. 835 .05 3	Bagian Administrasi Pembanguna dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Biaya Telepon (12 Bulan) yang terpenuhi	12 Bulan					12 Bulan	88.0 00.0 00	12 Bulan	96.8 00.0 00	12 Bulan	106. 480. 000	100 %	37. 514 .92 8	Bagian Administrasi Pembanguna dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyuru	Jumlah Penyediaan Materai dan	12 Bulan					12 Bulan	77.4 51.0 00	12 Bulan	85.1 96.1 00	12 Bulan	93.7 15.7 10	100 %	26. 277 .00 8	Bagian Administrasi Pembanguna	Kabupaten Jem

			rat	Buku Cek Bank yang terpenu hi													n dan Penga daan Barang Jasa	ber
		4.01.01. 2.08.03	Penye diaan Jasa Perala tan dan Perlen gkapa n Kantor	Jumlah Paket Pemelih araan Peralata n Kerja	12 Bulan				12 Bula n	27.3 51.5 00	12 Bula n	30.0 86.6 50	12 Bulan	33.0 95.3 15	100 %	568 .40 8.0 00	Bagian Admini strasi Pemba nguna n dan Penga daan Barang Jasa	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.09	Pemeli haraan Barang Milik Daera h Penunj ang Urusa n Pemer intaha n Daera h	Persenta se barang milik daerah yang terpeliha ra	100%				100 %	50.0 99.5 00	100 %	55.1 09.4 50	100%	60.6 20.3 95	100 %	493 .47 0.0 91	Kasubb ag Pemb inaan & Advok asi Penga daan Barang Jasa	Kab upat en Jem ber
		4.01.01.	Penye diaan	Jumlah Kendara	1 Unit				1	134.	1	147.	1 Unit	162.	100	172 .41	Kasubb ag	Kab upat

		2.09.01	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	an Dinas Jabatan yang dipelihara					Unit	145.000	Unit	559.500		315.450	%	8.312	Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang Jasa	en Jember
		4.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kantor Yang Dipelihara	9 Unit				9 Unit	134.145.000	9 Unit	147.559.500	9 Unit	162.315.450	100 %	321.051.780	Kasubbag Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember

			Operasional atau Lapangan																
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju Inflasi	100%				100%	3.26 2.80 1.30 0	100%	3.58 9.08 1.43 0	100%	3.94 7.98 9.57 3	100%	21. 171 .57 0.8 33	Kepala Bagian Administrasi Pembinaan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember	
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembinaan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	3 Buku				3 Buku	507. 551. 000	3 Buku	558. 306. 100	3 Buku	614. 136. 710	100%	3.2 79. 914 .19 1	Kasubbag Penyusunan Program & Pengendalian Program	Kabupaten Jember	
		4.01.03.2.02.01	Fasilitas Penyuluhan	Jumlah Dokumen	3 Buku				3 Buku	507. 551.	3 Buku	558. 306.	3 Buku	614. 136.	100%	17. 891 .65	Kasubbag Pengel	Kabupaten	

			sunan Progra m Pemba nguna n	Penyusu nan Program Pemban gunan yang Terfasilit asi						000		100		710		6.6 42	olaan Penga daan Barang Jasa dan LPSE	Jem ber	
		4.01.03. 2.03	Pengel olaan Penga daan Barang dan Jasa	Tingkat Kematan gan UKPBJ	100%					100 %	2.75 5.25 0.30 0	100 %	3.03 0.77 5.33 0	100%	3.33 3.85 2.86 3	100 %	13. 249 .05 3.4 02	Kasubb ag Pengel olaan Penga daan Barang Jasa dan LPSE	Kab upat en Jem ber
		4.01.03. 2.03.01	Pengel olaan Penga daan Barang dan Jasa	Jumlah Pembay aran Honorari um UKPBJ - 12 Bulan yang terpenu hi	12 Bulan					12 Bula n	2.05 3.22 5.90 0	12 Bula n	2.25 8.54 8.49 0	12 Bulan	2.48 4.40 3.33 9	100 %	4.5 42. 603 .24 0	Kasubb ag Pengel olaan Penga daan Barang Jasa dan LPSE	Kab upat en Jem ber
		4.01.03. 2.03.02	Pengel olaan Layana n	Jumlah Pembay aran Honorari	12 Bulan					12 Bula n	702. 024.	12 Bula n	772. 226.	12 Bulan	849. 449.	100 %	100 .00 0.0	Kasubb ag Pemb inaan &	Kab upat en Jem

			Pengadaan Secara Elektronik	um LPSE - 12 Bulan yang terpenuhi					400		840		524		00	Advokasi Pengadaan Barang Jasa	ber	
		4.01.03.2.03.03	Pembi naan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang terpenuhi	600 Orang				600 Orang	75.000.000	600 Orang	80.000.000	600 Orang	85.000.000	100 %	Bagian Umum	Kabupaten Jember	
	Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada pimpinan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%				100 %		100 %		100%		100 %	Bagian Umum	Kabupaten Jember	
		4.01.01	Program Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan	100%				100 %	Rp 64.064.449.536	100 %	Rp 50.993.669.536	100%	Rp 50.993.669.536	100 %	41.862.173.500	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dikelola	100%				100%	Rp 19.947.816	100%	Rp 19.947.816	100%	Rp 19.947.816	100%	17.507.267,787	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%				100%	Rp 16.558.916	100%	Rp 16.558.916	100%	Rp 16.558.916	100%	15.514.427,87	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%				100%	Rp 3.388.900,00	100%	Rp 3.388.900,00	100%	Rp 3.388.900,00	100%	1.992.845,000	Bagian Umum	Kabupaten Jember

				ASN															
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%					100%	Rp 22.500.000	100%	Rp 22.500.000	100%	Rp 22.500.000	100%	17.526.314	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%					100%	Rp 22.500.000	100%	Rp 22.500.000	100%	Rp 22.500.000	100%	17.526.314	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%					100%	Rp 365.625.000	100%	Rp 365.625.000	100%	Rp 365.000	100%	385.866.369	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.	Pengadaan	Persentase	100%					100%	Rp 365.	100%	Rp 365.	100%	Rp 365.	100%	385.86	Bagian	Kabupaten

		2.05.02	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					%	625.000	%	625.000		625.000	%	6.369	Umum	en Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dikelola	90%				100%	Rp 22.700.712.430	100%	Rp 18.700.712.430	100%	Rp 18.700.712.430	100%	10.506.368.270	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%				100%	Rp 199.573.700	100%	Rp 199.573.700	100%	Rp 199.573.700	100%	207.887.556	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan	Persentase Penyediaan	100%				100%	Rp 12.081.735.13	100%	Rp 8.081.735.13	100%	Rp 8.081.735.13	100%	237.773.8	Bagian Umum	Kabupaten Jem

			dan Perengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30		0		0		52		ber	
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%					100%	Rp 520.078.600	100%	Rp 520.078.600	100%	Rp 520.078.600	100%	8.946.300	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%					100%	Rp 3.371.268.000	100%	Rp 3.371.268.000	100%	Rp 3.371.268.000	100%	4.200.244.012	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	100%					100%	Rp 190.380.000	100%	Rp 190.380.000	100%	Rp 190.380.000	100%	229.251.970	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan	Persentase Penyediaan	100%					100%	6.000.00	100%	6.000.00	100%	6.000.00	100%	-	Bagian Umum	Kabupaten

			Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0		0		0				Jember	
		4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	100%					100%	Rp 2.839.660,00	100%	Rp 2.839.660,00	100%	Rp 2.839.660,00	100%	2.840.530,643	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%					100%	Rp 3.492.017,00	100%	Rp 3.492.017,00	100%	Rp 3.492.017,00	100%	2.781.733,937	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%					100%	Rp 8.963.956,290	100%	Rp 8.963.956,290	100%	Rp 8.963.956,290	100%	6.488.560,304	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Pemerintah Daerah	Pemerintahan Daerah															
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%					100%	Rp 326.405.970	100%	Rp 326.405.970	100%	Rp 326.405.970	100%	166.078.050	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%					100%	Rp 2.477.972.820	100%	Rp 2.477.972.820	100%	Rp 2.477.972.820	100%	2.515.991.704	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%					100%	Rp 2.278.297.500	100%	Rp 2.278.297.500	100%	Rp 2.278.297.500	100%	1.626.637.100	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Kantor																
		4.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%				100 %	Rp 3.88 1.28 0.00 0	100 %	Rp 3.88 1.28 0.00 0	100%	Rp 3.88 1.28 0.00 0	100 %	2.1 79. 853 .45 0	Bagian Umum	Kab upat en Jem ber	
		4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpeliharaan	100%				100 %	Rp 9.07 0.78 0.00 0	100 %	Rp 9.07 0.78 0.00 0	100%	Rp 9.07 0.78 0.00 0	100 %	4.6 30. 162 .83 5	Bagian Umum	Kab upat en Jem ber	
		4.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	100%										100 %	954 .43 5.2 43	Bagian Umum	Kab upat en Jem ber	

			Pajak Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kenda raan Dinas Jabata n	dan Pajak Kendara an Perorang an Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan															
		4.01.01. 2.09.02	Penye diaan Jasa Pemeli haraan , Biaya Pemeli haraan , Pajak, dan Perizin an Kenda raan Dinas Opera sional atau Lapan gan	Persenta se Penyedia an Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan, Pajak, dan Perizina n Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	100%									100 %			1.9 73. 615 .53 8	Bagian Umum	Kab upat en Jem ber

		4.01.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemeliharaan Mebel	100%					100%	Rp 200. 000. 000	100%	Rp 200. 000. 000	100%	Rp 200. 000. 000	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesini lainnya	Persentase Pemeliharaan peralatan dan mesini lainnya	100%					100%	Rp 1.10 0.40 5.00 0	100%	Rp 1.10 0.40 5.00 0	100%	Rp 1.10 0.40 5.00 0	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%					100%	Rp 3.42 0.12 5.00 0	100%	Rp 3.42 0.12 5.00 0	100%	Rp 3.42 0.12 5.00 0	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasio	100%					100%	Rp 1.78 0.75 0.00 0	100%	Rp 1.78 0.75 0.00 0	100%	Rp 1.78 0.75 0.00 0	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember

			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	nal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%				100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Persentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan	100%				100%	Rp 455.750.000	100%	Rp 455.750.000	100%	Rp 455.750.000	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember

			Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah														
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%				100%	Rp 1.125.000	100%	Rp 1.125.000	100%	Rp 1.125.000	100%	959.641.500	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	100%				100%	Rp 1.212.600	100%	Rp 1.212.600	100%	Rp 1.212.600	100%	1.075.450.400	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangg	Persentase Penyediaan Kebutuhan	100%				100%	Rp 707.374.000	100%	Rp 707.374.000	100%	Rp 707.374.000	100%	618.543.300	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			a Kepala Daerah	Rumah Tangga Kepala Daerah														
		4.01.01. 2.12.02	Penye- diaan Kebut- uhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persenta- se Penyedia- an Kebutuh- an Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100%				100 %	Rp 504. 938. 600	100 %	Rp 504. 938. 600	100%	Rp 504. 938. 600	100 %	456 .90 7.1 00	Bagian Umum	Kab upat en Jem ber
Mening- katnya Kualitas Penera- pan Sistem Akunta- bilitas Kinerja Instansi Pemer- intah				Nilai SAKIP	61,60 (B)				73,4 7 (BB)		77,2 6 (BB)		80,12 (A)		80,5 6 (A)		Bagian Organi- sasi	Kab. Jem ber
	Terwuju- dnya penyela- nggaraan			Indeks Pelayana- n Publik	N/A				3,25 (B-)		3,50 (B-)		3,75 (B)		4,51 (A-)		Bagian Organi- sasi	Kab. Jem ber

	pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima																		
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38%					100 %	1.159.000.000	100 %	1.159.000.000	100%	1.159.000.000	90%	4.636.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.13	Penataan Organisasi	Persentase capaian penataan	50%					100 %	820.000.000	100 %	820.000.000	100%	820.000.000	100 %	3.280.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

				kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi yang terfasilitasi												0		
		4.01.01.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan				2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	10 dok	680.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.13.03	Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan RB	2 dokumen				2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10 dok	1.000.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.13.01	Pengelolaan Kelembagaan	Jumlah dokumen Pengelola	2 dokumen				2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	10 dok	1.600.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

			n dan Anjab	aan kelembagaan dan anjab												0		
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peringkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%				100%	34.000.00	100%	34.000.00	100%	34.000.00	100%	136.000.00	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen				1	17.000.00	1	17.000.00	1	17.000.00	5 dok	68.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	1 dokumen				1	17.000.00	1	17.000.00	1	17.000.00	5 dok	68.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

			Perubahan RKA-SKPD	laporan hasil														
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang dikelola	100%				100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	680.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen				12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	60 dokumen	680.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dikelola	100%				100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	260.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.	Penyediaan	Jumlah Paket	1 doku				1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	5 pake	260.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jem

		2.06.04	Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	men					00,00		00,00		00,00	t	0.000	sasi	ber
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100%				100%	20.000,00	100%	20.000,00	100%	20.000,00	100%	80.000,00	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0				2	20.000,00	2	20.000,00	2	20.000,00	10 buah	80.000,00	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.	Pemeliharaan	Persentase	100%				100	50.000,00	100	50.000,00	100%	50.000,00	100	200,00	Bagian Organisasi	Kab. Jem

		2.09	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah yang terpelihara					%	00	%	00		00	%	0.000	sasi	ber
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 unit				20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	100	200.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase pelayanan keprotokolan, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan yang	100%				100%	6.257.914.592	100%	7.147.914.592	100%	7.597.914.592	100%	6.067.189.145	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			ATEN/ KOTA	terfasilitasi														
		4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan	100%				100%	1.20 3.67 6.80 0	100%	1.30 3.67 6.80 0	100%	1.40 3.67 6.80 0	100%	1.045.368.477	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya honor dan lembur	100%				12 bulan	1.20 3.67 6.80 0	12 bulan	1.30 3.67 6.80 0	12 bulan	1.40 3.67 6.80 0	100%	1.045.368.477	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana	100%				100%	667.510.800	100%	687.510.800	100%	717.510.800	100%	624.560.151	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

				a kantor															
		4.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100%					12 bulan	225.720.700	12 bulan	235.720.700	12 bulan	245.720.700	100%	214.907.000	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman serta bahan kebersihan kantor	100%					12 bulan	330.808.100	12 bulan	330.808.100	12 bulan	340.808.100	100%	308.671.151	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggan	100%					12 bulan	110.982.000	12 bulan	120.982.000	12 bulan	130.982.000	100%	100.982.000	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			n	daan															
		4.01.01. 2.06.06	Penye- diaan Bahan Bacaa n dan Peratu ran Perun dang- undan gan	Jumlah bulan Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- undanga n	100%					-	-	-	-	-	-	100 %	15. 192 .00 0	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.08	Penye- diaan Jasa Penunj ang Urusa n Pemer intaha n Daera h	Presenta se pemenu han kebutuh an pemelih araan sarana prasaran a kerja sesuai dengan standar daerah	100%					100 %	64.0 05.2 42	100 %	74.0 05.2 42	100%	84.0 05.2 42	100 %	52. 361 .35 3	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.08.02	Penye- diaan Jasa Komu nikasi,	Jumlah bulan tersedia nya jasa komunik	100%					12 bula n	64.0 05.2 42	12 bula n	74.0 05.2 42	12 bulan	84.0 05.2 42	100 %	52. 361 .35 3	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem

			Sumber Daya Air dan Listrik	asumsi, sumber daya air dan listrik														ber	
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	100%					100%	457.691.150	100%	567.691.150	100%	677.691.150	100%	339.840.300	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizin	Jumlah kendaraan jabatan roda 4 yang dipelihara dan dibayar pajaknya	100%					-	-	-	-	-	-	100%	115.865.500	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			an Kenda raan Dinas Opera sional atau Lapan gan															
		4.01.01. 2.09.02	Penye diaan Jasa Pemeli haraan , Biaya Pemeli haraan , Pajak, dan Perizin an Kenda raan Dinas Opera sional atau Lapan gan	Jumlah kendara an jabatan roda 4 yang dipelihar a dan dibayar pajaknya	100%				12 unit	412. 691. 150	12 unit	512. 691. 150	12 unit	612. 691. 150	100 %	306 .27 4.7 00	Bagian Prokop im	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.09.06	Pemeli haraan Perala	Jumlah bulan terlaksa	100%				45 kali	45.0 00.0	45 kali	55.0 00.0	45 kali	65.0 00.0	100 %	33. 565 .60	Bagian Prokop	Kab upat en

			tan dan Mesin Lainnya	nakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						00		00		00		0	im	Jember	
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%					100%	4.315.030.600	100%	4.515.030.600	100%	4.715.030.600	100%	4.005.058.864	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan	100%					800 kegiatan	1.491.134.800	800 kegiatan	1.591.134.800	800 kegiatan	1.691.134.800	100%	1.381.235.064	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Pendokumentasian	100%					800 kegiatan	2.823.895.800	800 kegiatan	2.923.895.800	800 kegiatan	3.023.895.800	100%	2.623.823.800	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			an	an Tugas Pimpina n															

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
SEBELUM PERUBAHAN									
Bagian Tata Pemerintahan									
1	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Petunjuk								
3	Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	70%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
4	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti ;	91%	95%	97%	97%	98%	97%	98%	98%
6	Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	91%	95%	97%	97%	98%	97%	98%	98%
7	Persentase kecamatan	86%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

	dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman								
8	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	91%	95%	95%	95%	95%	97%	98%	98%
9	Persentase peningkatan kerjasama daerah	75%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	94%	97%	96%	94%	96%	98%	98%	98%
11	Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	94%	97%	96%	94%	96%	98%	98%	98%
Bagian Kesra									

1	Jumlah event yang diikuti/dilaksanakan	60%	70%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Persentase Calon jamaah Haji tiba di tanah suci dan kembali ke tanah air	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah kegiatan keagamaan yang terselenggara	50%	50%	90%	90%	90%	100%	100%	95%
4	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	30%	66%	66%	66%	100%	66%	100%	100%
6	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Persentase tingkat partisipasi aparatur	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Hukum									
1	Persentase Peraturan Daerah yang diusulkan ke DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peraturan Bupati yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Keputusan Bupati yang dihasilkan	70%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
4	Persentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin	90%	91%	92%	93%	95%	97%	97%	97%
6	Persentase jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat								
7	Jumlah Penyuluhan Hukum	2	2	6	6	6	6	6	6
8	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	0	0	2	4	4	4	4	4
Bagian Perekonomian dan SDA									
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	71 dokumen
2	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72 laporan
3	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	72 laporan

	Ekonomi Mikro Kecil								
4	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkrosisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	0	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	16 dokumen
5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 dokumen
6	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	0	0	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
7	Jumlah Dokumen	0	0	0	4 doku	4 doku	4 doku	4 doku	4 dokumen

	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				men	men	men	men	
8	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	0	0	0	0	0	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Bagian Administrasi Pembangunan dan PBJ									
1	Indikator Tujuan : Meningkatkan tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	pembangunan Indikator								
2	% Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	% Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Umum									
1	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Operasional (SOP) dalam rangka melaksanakan urusan administrasi pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Organisasi									
1	Indeks Pelayanan Publik	2.51 (C)	2.75 (C)	3.00 (C)	3.25 (B-)	3.50 (B-)	3.75 (B)	4.01 (A-)	4.01 (A-)
2	Nilai SAKIP Kabupaten	60.75 (B)	69.00	70.47	73.47	77.26	80.12	80.56	80.56 (A)

	Jember		(B)	(BB)	(BB)	(BB)	(A)	(A)	
3	% UPP yang menindaklanjuti hasil pemantauan kepatuhan standar pelayanan publik	N/A	40%	50%	75%	75%	75%	75%	75%
4	% PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik	6%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
5	% PD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai pedoman	60%	40%	50%	75%	75%	75%	75%	75%
6	% Dokumen SAKIP PD berkualitas Baik	40%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%
7	% Hasil Monev Kelembagaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	% kompetensi jabatan sesuai pedoman	10%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	% dokumen anjab/ ABK sesuai pedoman	2.51 (C)	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
1	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Presentase Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Presentase Prog. Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Presentase Pengembangan Dokumentasi Dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Presentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SETELAH PERUBAHAN									
1	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	90%			98,29 %	98,31 %	98,37 %	98,46 %	99,54%
2	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90%			93%	95%	96%	97%	98%
3	Persentase kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	100%			95%	95%	95%	95%	95%
4	Persentase kualitas produk	100%			100%	100%	100%	100%	100%

	hukum daerah yang terfasilitasi								
5	Persentase peningkatan sinergitas di bidang perekonomian dan SDA, bidang administrasi pembangunan, serta PBJ	100%			100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%			100%	100%	100%	100%	100%
7	Nilai SAKIP	61,60 (B)			73,47 (BB)	77,26 (BB)	80,12 (A)	80,56 (A)	80,56 (A)
8	Indeks Pelayanan Publik	N/A			3,25 (B-)	3,50 (B-)	3,75 (B)	4,51 (A-)	4,51 (A-)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, Maret 2023
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 2 002